

346.0626  
PRA  
p ei



**PENYATUAN 4 (EMPAT) BANK BUMN  
MENJADI  
PT. BANK MANDIRI (PERSERO)  
DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI  
DAN AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi  
Persyaratan Program Magister Kenotariatan**

Oleh :

NOERHADI HERU PRASETYA  
B4B000169

Pembimbing :  
HERMAN SUSETYO SH, M Hum

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2003**

**UPT-PUSTAK-UNDIP**

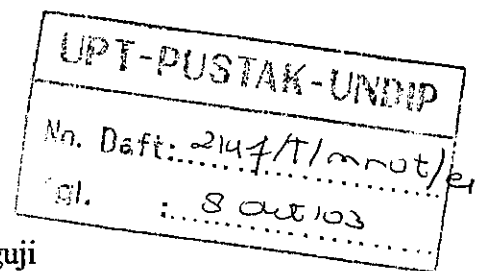
Tesis :

**PENYATUAN 4 (EMPAT) BANK BUMN  
MENJADI  
PT. BANK MANDIRI (PERSERO)  
DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI  
DAN AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA**

Disusun oleh :

NOERHADI HERU PRASETYA

B4B000169



Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada tanggal 15 April 2003

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui

Komisi Pembimbing

Pembimbing

( Herman Susetyo SH, M.Hum )

Ketua Program Studi

Magister Ilmu Kenotariatan

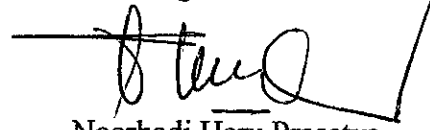
( Prof. IGN. Sugangga, SH )

### **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 27 Maret 2003



Noerhadi Heru Prasetya

## **KATA PENGANTAR**

Tiada kata lain yang lebih pantas diucapkan selain puji syukur kehadirat Allah SWT. Sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini pada program studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dengan judul “PENYATUAN 4 ( EMPAT ) BANK BUMN KE DALAM PT. BANK MANDIRI ( PERSERO ) DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI DAN AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA “.

Sepintas nampaknya begitu mudah tetapi kenyataannya penulis harus mengakui bahwa menyusun tesis ternyata tidak mudah. Keterbatasan pengetahuan, wawasan, literatur serta waktu merupakan sumber utama yang menjadikannya dalam bentuknya yang belum sempurna.

Meskipun begitu pada akhirnya tesis ini dapat juga diselesaikan berkat ketekunan, kesabaran maupun dorongan serta bantuan dari berbagai pihak dan merupakan buah yang dapat dipetik dengan diselesaikannya tesis ini dan juga studi notariat ini.

Tiada ada sesuatu yang sempurna di dunia ini dan sesuatu yang sempurna pun belum tentu sempurna kiranya berlaku juga pada tesis ini.

Untuk itulah dengan penuh kerendahan hati, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dari para pembaca yang budiman.

Pada kesempatan ini ijinilah penulis dengan hati yang tulus untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada yang saya hormati Bapak Herman Susetyo, SH. M Hum, yang telah meluangkan waktu yang sangat berharga kepada penulis dan dengan tekun serta kesabarannya memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian tesis ini maupun selama studi di kenotariatan ini penulis juga banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, Msc. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prog. IGN. Sugangga, SH., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak R. Suharto, SH. M. Hum, Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Bambang Eko T., SH, MHum yang merupakan Dosen Wali dari penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis
6. Seluruh civitas akademika Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang dengan tulus telah memberikan pelayanan dan bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Mohammad Isa, SH, LLM, selaku Kepala Divisi Legal PT. Bank Mandiri ( Persero ) beserta staf yang telah berkenan memberikan data-data, informasi maupun wawancara sehingga memudahkan penulis menyusun tesis ini.
8. Rekan-rekan peserta Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang angkatan 2000/2001 atas semangat kebersamaan yang

telah kita jalani bersama selama mengikuti kuliah telah banyak memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah dengan ikhlas memberikan bantuan dan dorongan baik selama mengikuti studi maupun dalam penyelesaian tesis ini.

Pada kesempatan ini pula penulis ingin memberikan ucapan terima kasih kepada istriku tercinta Siti Noerlaila serta puteraku tersayang Cahya Koespradana ( Boy ) yang telah memberikan pengorbanan atas waktu dan perhatian yang telah disita oleh penulis selama penulis mengikuti pendidikan dan penyusunan tesis ini. Demikian tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis Bapak dan Ibu Koeshadi yang telah membesarkan dan menuntun penulis sejak kecil hingga dewasa serta atas dorongan dan motivasi mereka pula sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. .

Pada akhirnya harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang menaruh perhatian dan khususnya dalam memberikan wujud nyata untuk pengabdian kepada Universitas Diponegoro Semarang sebagai almamaterku..

Semarang, 27 Maret 2003

Penulis

Noerhadi Heru Prasetya

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	iv
<b>DAFTAR ISI .....</b>	vii
<b>ABSTRAK .....</b>	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	01
A. Latar Belakang .....	01
B. Perumusan Masalah .....	05
C. Tujuan Penelitian .....	06
D. Kegunaan Penelitian .....	06
E. Kerangka Pemikiran .....	07
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	22
A. TENTANG KELEMBAGAAN BADAN USAHA PERBANKAN .....	22
I. Pengaturan Kelembagaan Badan Usaha Perbankan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas .....	22
II. Pengaturan kelembagaan Badan Usaha Perbankan di dalam Undang-Undang Perbankan .....	29

B. TINJAUAN TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) .....	42
C. MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI .....	50
1. Pengertian merger, konsolidasi dan akuisisi .....	52
2. Motivasi dan tujuan merger, konsolidasi dan akuisisi .....	56
3. Penggolongan merger .....	61
4. Keterlibatan pihak-pihak dalam merger, konsolidasi dan akuisisi .....	64
D. AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA .....	70
1. Akibat hukum merger dan konsolidasi .....	70
2. Akibat hukum akuisisi .....	73
E. PERANAN BANK INDONESIA SEBAGAI PEMBINA DAN PENGAWAS PERBANKAN .....	74
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>80</b>
1. Metode Pendekatan .....	81
2. Spesifikasi Penelitian .....	82
3. Sumber Data .....	82
4. Teknik Penentuan Sampel .....	84
5. Analisa Data .....	85
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>86</b>
A. Latar Belakang dan Pertimbangan Penyatuan ke empat Bank BUMN .....	86



B. Persyaratan dan Prosedur Merger, Konsolidasi dan Akusisi .....	88
C. Proses berdirinya PT. Bank Mandiri ( Persero ) .....	108
D. Akibat Hukum yang timbul .....	125
E. Perlindungan para pihak yang berkepentingan .....	142
F. Peran Bank Indonesia dalam proses penyatuan ke empat bank ke dalam PT. Bank Mandiri ( Persero ) .....	145

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	147
B. Saran .....	150

## **RINGKASAN**

## **DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

Merger, Konsolidasi dan Akuisisi untuk perseroan terbatas selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Sedangkan untuk perbankan selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 juga tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi bank dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pengertian Merger, Konsolidasi dan Akuisisi menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 sebagai berikut :

- a. Merger adalah penggabungan dari 2 (dua) bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.
- b. Konsolidasi adalah penggabungan dari 2 (dua) bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu.
- c. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank.

Bahwasannya dalam melakukan perbuatan hukum merger, konsolidasi maupun akuisisi perseroan baik itu Perseroan Terbatas pada umumnya maupun Perseroan Terbatas Perbankan harus betul-betul di perhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, persaingan sehat dalam melakukan usaha dan kepentingan masyarakat.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan Yuridis Empiris menggunakan analisa yang bersifat diskriptis dengan metode kuantitatif. Data diperoleh selain didapatkan dari penelitian di lapangan dengan melalui wawancara dan pengamatan di lapangan juga didapat melalui data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penggabungan 4 (empat) Bank BUMN ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) tidak dilaksanakan secara murni dengan cara langsung menggunakan merger namun terlebih dahulu dilakukan dengan cara akuisisi.

## ABSTRACT

Merger, Consolidation, and Acquisition for Limited Company is not only ruled under the Regulation Number 1 1995 concerning with Limited Company but also ruled under the Government Regulation Number 27 1998 about Merging, and the Taking Over of Limited Company.

Banking is not only ruled under the Regulation number 1 1995, but it also bows to the Government Regulation Number 28 1999 about Merger, Consolidation and Bank Acquisition, and regulation number 10 1999 about Regulation Modification Number 7 1992 about Banking.

The definition of Merger, Consolidation and Acquisition, according to the Provision of Government Rule Number 28 1999 are as follows:

- a. Merger is a process of merging amongst two banks or more by keeping one Bank as a solid corporation and dispersing the other banks without prior liquidation toward those banks
- b. Consolidation is a process of unifying two or more banks by founding a new bank and dispersing the other banks without prior liquidation toward those banks.
- c. Acquisition is the taking over of a bank ownership, which causes changes in the control of a bank.

In doing the practice of rule act in merger, consolidation, or acquisition for the common Limited Company or for Banking Limited Company, the thing that must be taken as a consideration is the interest of the company, the minority share holders, the employees of the company, and a healthy competition in practicing the business, as well as for the sake of society.

This research is conducted by Empirical Jurisdiction approach using descriptive analysis feature and quantitative method. Data is obtained not only from the field research by doing interview and field observation, but also from the secondary source of data.

The result of this research shows that the implementation of four State-Owned Corporation (BUMN) banks merging into Bank Mandiri, Ltd is not implemented directly by doing merger, but it is done by prior acquisition.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Dunia Perbankan pernah mengalami masa keemasan diseperti Tahun 1990-an. Paket kebijaksanaan Pemerintah yang terkenal dengan Pakto ( Paket Oktober ) 1988 memberikan kemudahan pendirian bank dan kantor-kantor cabangnya. Setelah kebijaksanaan tersebut diluncurkan, jumlah bank tumbuh berkembang secara pesat, banyak bank umum naik status menjadi Bank Devisa.

Namun demikian berkembangnya bank yang menabjukan tersebut ternyata tidak selalu diikuti oleh etika, morak pemilik dan pengelolanya dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi. Pada saat itu bank-bank berlomba-lomba menghimpun dana masyarakat melalui hadiah-hadiah milyaran rupiah dan masyarakat terpicat menyimpan uangnya di bank tersebut.

Sebagian dana masyarakat tersebut tidak disalurkan kembali berupa pinjaman ke sektor riil yang akan menjadi roda penggerak ekonomi, tetapi dipakai oleh perusahaan yang masih satu grup dengan bank tersebut. Ketika pinjaman tersebut bermasalah atau macet maka hancurlah beberapa bank setelah diserbu oleh nasabahnya. Kehancuran Perbankan Indonesia mencapai puncaknya saat krisis ekonomi menerpa Indonesia pada pertengahan Tahun 1997 dimana satu persatu bank runtuh dikarenakan pondasinya yang amat rapuh.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Harian Suara Merdeka, Minggu tanggal 31 Maret 2002, Hal. 5

Sebelum Pakto 1988 Bank BUMN dapat dengan mudahnya melakukan pemupukan dana BUMN dalam bentuk giro, sertifikast deposito. Deposito maupun deposito on call. Hal tersebut disebabkan karena disamping karena ada kebijaksanaan dari masing-masing Pimpinan BUMN agar dananya ditempatkan di Bank Pemerintah dikarenakan faktor resikonya kecil, juga dikarenakan tingkat persaingan antar bank pada waktu itu tidak terlalu ketat. Namun setelah dikeluarkannya Pakto 1988 dimana orang atau Badan Hukum dapat dengan mudahnya mendirikan bank, banyak bank-bank bermunculan sehingga timbul suatu tingkat persaingan yang tajam diantara bank-bank.

Bank-bank berlomba-lomba melakukan pemupukan dana baik dari masyarakat maupun dari dana-dana BUMN yang tentunya dengan iming-iming hadiah yang sangat menarik maupun pemberian produk-oroduk Perbankan yang baru dari bank swasta tersebut.

Bank-bank BUMN berusaha keras untuk memperoleh dana dari masyarakat sehingga sering terjadi dalam pemupukan dana tersebut Bank BUMN cenderung melakukan tindakan-tindakan yang kurang sehat.

Dalam pemberian fasilitas kredit kepada para debitur sering dilakukan suatu kebijaksanaan yang pada dasarnya lebih banyak menyimpang dari Standar Operating Prosedur ( SOP ) sehingga akhirnya mengakibatkan timbulnya kredit bermasalah yang menjurus menjadi macet.

Menghadapi keadaan Perbankan sebagaimana disebut diatas maka dalam rangka menjaga citra Bank sebagai Lembaga kepercayaan masyarakat karena mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi nasional dan

kesejahteraan masyarakat, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997 tentang perubahan atas ketentuan dan tata cara , pencabutan ijin usaha, pembubaran dan likuidasi bank yang isinya antara lain memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri untuk melaksanakan segala wewenang pemegang saham dalam mengambil langkah-langkah penggabungan, peleburan atau pengambilalihan bank tanpa Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga dengan demikian Bank Indonesia dapat melaksanakan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyetatkan suatu bank tanpa Rapat Umum Pemegang Saham.

Pada Bank BUMN Pemerintah merencanakan untuk melakukan penyatuan terhadap 4 ( empat ) Bank BUMN yaitu PT. BANK DAGANG NEGARA ( PERSERO ), PT. BANK BUMI DAYA ( PERSERO ), PT. BANK PEMBANGUNAN INDONESIA ( PERSERO ), dan PT. BANK EKSPORT IMPORT ( PERSERO ).

Dari ke empat bank tersebut diatas PT. Bank Export Import Indonesia ( Persero ) ditunjuk atau dipilih sebagai leader dalam hal penyatuan tersebut atau lebih dikenal dengan Surviving Bank. Pemilihan PT. Bank Eksport Import Indonesia sebagai leader kemudian berubah menjadi Bank Mandiri sedangkan ketiga bank lainnya sebagai bank yang menggabungkan diri ke Bank Mandiri sehingga keberadaan ketiga bank tersebut tidak ada.

Alasan ditunjuknya PT. Bank Eksport Import Indonesia ( Persero ) pada waktu itu menjelang penggabungan sebagai surviving bank dikarenakan memiliki modal ± Rp. 22 triliun dibandingkan dengan PT. Bank Dagang Negara

( Persero )  $\pm$  Rp. 1,9 triliun, PT. Bank Bumi Daya ( Persero ) sebesar  $\pm$  Rp. 1,7 triliun dan PT. Bapindo sebesar  $\pm$  Rp. 1,8 triliun. Akan tetapi bila ditinjau dari segi aset pada waktu itu PT. BEII sebesar  $\pm$  Rp. 57, 8 triliun, masih dibawah PT. BDN sebesar  $\pm$  Rp. 78,5 triliun, PT. BBD sebesar  $\pm$  Rp. 65,4 triliun.

Penunjukan PT. BEII sebagai *survaiving bank* ternyata banyak ditentang oleh berbagai kalangan. Hal tersebut disebabkan karena:

1. Langkah pemerintah melaksanakan kebijakan dalam menetapkan PT. BEII tersebut dianggap tidak adil dan tidak transparan. Berbagai kalangan menyesalkan penunjukan PT. BEII sebagai *survaiving bank* karena pada waktu  $\pm$  Tahun 1997 telah terjadi kerugian transaksi valas sebesar  $\pm$  Rp. 20 triliun.
2. Apabila Pemerintah hanya mendasarkan pada alasan praktis maka disini Pemerintah tidak melaksanakan perlakuan yang sama dalam pelaksanaan merger dari ke 4 ( empat ) Bank BUMN tersebut.

Ditengah kontroversi pendapat dari berbagai kalangan maka pemerintah kemudian pada tanggal 1 Oktober 1998 mendirikan suatu bank baru yakni PT. Bank Mandiri ( Persero ). Modal yang disertakan di PT. Bank Mandiri ( Persero ) diperoleh dari ke 4 ( empat ) Bank BUMN tersebut. Peraturan yang mengatur penyertaan modal tersebut dituangkan dalam PP Nomor 75 Tahun 1998 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Persero di bidang Perbankan sehingga pada akhirnya tidak ada bank yang ditetapkan sebagai *survaiving bank*, sebaliknya ke 4 ( empat ) Bank BUMN tersebut menyatu kedalam PT. Bank Mandiri ( Persero ).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka perlu diadakan suatu penelitian atau pengkajian terhadap pelaksanaan bergabungnya ke 4 bank BUMN tersebut menjadi PT. Bank Mandiri ( Persero ). Apakah melalui proses merger, konsolidasi, atau akuisisi secara lebih mendalam pada aspek akibat hukum yang ditimbulkannya terhadap proses bergabungnya ke 4 ( empat ) Bank BUMN ke dalam PT. Bank Mandiri ( Persero ).

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Dari hal-hal sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, dapatlah dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan penyatuan ke 4 Bank BUMN ( PT. BDN, PT. BBD, PT. BEII DAN PT. BAPINDO ) menjadi PT. BANK MANDIRI ( Persero ).
2. Akibat hukum apakah yang ditimbulkan untuk ke 4 Bank BUMN sehubungan dengan disatukannya menjadi PT. BANK MANDIRI ( Persero )
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para nasabah dan karyawan ke 4 Bank BUMN ( PT. BDN, PT. BBD, PT. BEII DAN PT. BAPINDO ) menjadi PT. BANK MANDIRI ( Persero ).
4. Bagaimana peran serta Bank Indonesia selaku pengawas Perbankan dalam pelaksanaan penyatuan ke 4 Bank BUMN ( PT. BDN, PT. BBD, PT. BEII DAN PT. BAPINDO ) yang disatukan menjadi PT. BANK MANDIRI ( Persero )



### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penyatuan ke 4 Bank BUMN ( PT. BDN, PT. BBD, PT. BEI DAN PT. BAPINDO ) menjadi PT. BANK MANDIRI ( Persero ).
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul untuk ke 4 Bank BUMN sehubungan dengan disatukannya menjadi PT. BANK MANDIRI ( Persero ).
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap para nasabah dan karyawan sehubungan dengan dilakukannya penyatuan ke 4 Bank BUMN menjadi PT. BANK MANDIRI ( Persero )
4. Untuk mengetahui peran serta Bank Indonesia selaku Pengawas Perbankan dalam pelaksanaan penyatuan ke 4 Bank BUMN menjadi PT. BANK MANDIRI ( Persero )

### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

1. Secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan hukum Perbankan khususnya tentang praktik merger, konsolidasi, dan akuisisi pada Bank BUMN.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai bahan rujukan atau bahan referensi tambahan mata kuliah khususnya tentang praktek merger, konsolidasi dan akuisisi dalam dunia Perbankan pada program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

## E. KERANGKA PEMIKIRAN

Bentuk Perseroan Terbatas atau PT merupakan bentuk yang lazim dan banyak dipakai dalam dunia usaha di Indonesia karena PT merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri.

Selain itu pada PT Persero juga mempunyai pertanggung jawaban yang bersifat terbatas dan juga memberikan kemudahan bagi pemegang saham untuk mengalihkan penyertaannya ( kepada setiap orang ) dengan menjual seluruh / sebagian saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.

Kata "Perseroan" menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero ( saham ) sedangkan kata "Terbatas" menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya.<sup>2</sup>

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan terbatas saat ini yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan tersebut pengertian Perseoran Terbatas ( Perseoran ) adalah :

"Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi prasyarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya".

Dari batasan yang diberikan tersebut diatas maka ada lima hal pokok yang dapat dikemukakan disini yakni :

---

<sup>2</sup> Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999 hal. 1

1. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum.
2. Didirikan berdasarkan perjanjian
3. Menjalankan usaha tertentu.
4. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham
5. Memenuhi persyaratan Undang-Undang

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan orang disini adalah orang – perseorangan atau badan hukum.

Persyaratan yang mewajibkan suatu perseroan didirikan oleh dua atau lebih dan kewajiban untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain sesuai kebutuhan Pasal 7 ayat 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN )

Perseroan terbatas yang usahanya di bidang perbankan pendiriannya harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 juga harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 32/33/Kep/Dir tanggal 12-5-1999 yang mengatakan bahwa :

Bank Umum hanya dapat didirikan oleh :

- a. Warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia atau
- b. Warga negara asing dan atau Badan Hukum asing secara kemitraan

Sedangkan yang dapat menjadi pemilik bank adalah pihak-pihak yang :

- a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai yang ditetapkan Bank Indonesia.
- b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik.

Peraturan yang mengatur tentang BUMN yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan.

Didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, yang dimaksud dengan Perusahaan Negara adalah :

1. Perusahaan Jawatan, disingkat PERJAN.
2. Perusahaan Umum, disingkat PERUM.
3. Perusahaan Perseroan, disingkat PERSERO.

Adapun mengenai pengertian PERJAN, PERUM dan PERSERO diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 yang mengatakan :

1. PERJAN adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur menurut ketentuan yang termaktub dalam Indonesische Bedrijvenwet atau IBW ( Staatsblad 1927 : 149 sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah )
2. PERUM adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960.
3. PERSERO adalah Perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas seperti diatur menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD ( Staatsblad 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali

diubah dan ditambah ) baik yang saham-sahamnya untuk sebagiannya maupun seluruhnya dimiliki oleh negara.

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan berdirinya bentuk PT yang dimaksudkan adalah seperti apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang menggantikan berlakunya ketentuan mengenai Perseroan Terbatas yang diatur dalam KUHD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan ( Persero ) BUMN dapat didirikan oleh satu pemegang saham yaitu negara yang diwakilkan kepada Menteri Keuangan selaku pemegang saham. Didalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 diatur tentang pengertian Persero yakni :

“ PERSERO adalah Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) yang dimaktub berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1995 yang seluruh atau paling sedikit 51% saham yang dikeluarkannya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung “.

Namun demikian meskipun Persero adalah BUMN yang secara khusus modalnya dimiliki oleh negara akan tetapi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Pasal 2 ayat 1 bahwa setiap penyertaan modal tersebut kedalam modal Perseroan Terbatas harus dengan penetapan Peraturan Pemerintah yang memuat maksud penyertaan dan besarnya kekayaan negara yang dipisahkan yang dipisahkan untuk penyertaan modal tersebut.

Demikian juga setiap perubahan atas penyertaan tersebut yang meliputi penambahan dan pengurangan penyertaan modal negara ditetapkan dengan

peraturan pemerintah. Sedangkan pelaksanaan penyertaan modal negara tersebut dan perubahannya dilakukan menurut ketentuan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.<sup>3</sup>

Perlu dikatakan pula bahwa meskipun namanya Persero, namun terhadap Persero berlaku prinsip-prinsip Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1995 ( Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 ).

Dari apa yang diuraikan tersebut diatas, maka inti dari Persero adalah :

- a. merupakan BUMN ( berdasarkan UU No. 9 / 1969 )
- b. berbentuk PT ( sesuai dengan UU No. 1 / 1995 )
- c. minimum 51% atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara
- d. melalui penyertaan modal secara langsung ( yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah )<sup>4</sup>

Mengingat bahwa topik tesis ini adalah penyatuan Bank BUMN maka penulis terlebih dahulu akan menerangkan tentang pengertian Perbankan.

Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat mempunyai peranan yang cukup penting karena lembaga Perbankan khususnya bank umum merupakan inti sari dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan menyimpan dananya, melakukan kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, Bank melayani kebutuhan

---

<sup>3</sup> IG. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, Kesaint Blanc, Bekasi Timur, 2000, hal. 105-106

<sup>4</sup> Ibid, hal. 105

pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistim pembayaran bagi semua sektor perekonomian.<sup>5</sup> Pengertian bank sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 butir 2 menyebutkan bahwa :

“ Bank adalah badan usaha yang mungkin pun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepadamasyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak “.

Dilihat dari jenisnya sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 bank terdiri dari :

1. Bank Umum, yakni bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkretitaan Rakyat yakni bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan bila dilihat dari kepemilikannya bank dapat dibagi dalam 2 ( dua ) golongan yakni :

1. Bank Milik Swasta, yang terdiri dari :
  - a. Bank Swasta nasional, artinya modal bank ini dimiliki oleh ornamag ataupun Badan Hukum Indonesia.
  - b. Bank Swasta Asing, artinya modal bank tersebut dimiliki oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing.

---

<sup>5</sup> Santosa Sembiring, Hukum Perbankan, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 7

Dalam hal ini ada kemungkinan bank ini merupakan cabang dari negara asal bank yang bersangkutan.

- c. Disamping kedua jenis bank ini dalam dunia Perbankan dikenal pula apa yang disebut dengan Bank Campuran.

Bank campuran adalah Bank Umum yang didirikan bersama oleh dua atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh Warga Negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

2. Bank Milik Pemerintah ( Negara ) artinya modal bank yang bersangkutan berasal dari Pemerintah.<sup>6</sup>

Mengenai kelembagaan usaha Perbankan yang modalnya berasal dari Pemerintah atau disebut Bank BUMN memiliki karakter yang berbeda dengan badan usaha Perbankan milik swasta.

Pada Bank BUMN merupakan Perusahaan Persero BUMN dan dapat didirikan oleh satu pemegang saham yaitu negara yang diwakilkan kepada Menteri Keuangan selaku pemegang saham. Sehingga dengan demikian ketentuan yang mengatur Bank BUMN yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas.

---

<sup>6</sup> Ibid, hal. 6-7



Bank Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam menjalankan usahanya mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan Perekonomian Nasional dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu perlu mendapatkan pembinaan, pengawasan yang efektif sehingga dapat berfungsi secara efisien, sehat, wajar dan mampu menghadapi persaingan di era globalisasi, mampu melindungi secara baik dana nasabah yang dititipkan serta menyalurkan dana tersebut ke sektor produktif.

Untuk tercapainya hal tersebut diatas maka sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia di beri kewenangan untuk mengatur dan mengawasi bank.

Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank-bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan Perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.

Selain itu Bank Indonesia :

- a. memberikan dan mencabut ijin usaha bank.
- b. memberikan ijin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank.
- c. memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank.
- d. memberikan ijin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan tertentu.

Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia dilaksanakan baik langsung atau tidak langsung yakni :

1. kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. apabila diperlukan kewajiban tersebut dikenakan pula terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak yang terkait dan pihak terafiliasi dari bank.
3. melakukan pemeriksaan terhadap bank baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.
4. apabila diperlukan pemeriksaan dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank.
5. memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terdapat suatu transaksi yang patut diduga merupakan tindak pidana.
6. apabila dari hasil pemeriksaan tidak diperoleh bukti yang cukup, Bank Indonesia pada hari itu juga mencabut perintah penghentian transaksi.

Dalam hal keadaan suatu Bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha Bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian Nasional, maka berdasarkan Pasal 37 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang –

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :

- a. Pemegang saham menambah modal.
- b. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi bank.
- c. Bank menghapus bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya.
- d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain.
- e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban.
- f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain.
- g. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan /atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

Didalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Merger atau penggabungan, konsolidasi atau peleburan dan akuisisi atau pengambilalihan diatur dalam BAB VII Pasal 102 sampai dengan Pasal 109. Jika diteliti lebih lanjut rumusan – rumusan yang ada dalam Pasal – Pasal tersebut dapat diketahui bahwa ketentuan mengenai merger dan konsolidasi diatur didalam 6 (enam) Pasal tersebut diatas.

Batasan pengertian penggabungan atau merger dan peleburan atau konsolidasi dinyatakan oleh Pasal 102 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995,

yaitu perseroan atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan perseroan yang telah ada atau **meleburkan** diri menjadi perseroan lain dan membentuk perseroan baru. Dari ketentuan Pasal 102 ayat 1 diatas tampak adanya kesamaan unsur yaitu adanya penyatuan atau penggabungan dan atau lebih perseroan yang semula masing-masing berdiri sendiri-sendiri secara hukum akibat hukum merger dan konsolidasi tersebut dinyatakan dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi penggabungan dan peleburan maka perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar dan dalam Pasal 107 ayat 2 menyatakan bahwa pembubaran sebagaimana ayat 1 dapat dilakukan dengan atau tanpa likuidasi.

Selanjutnya didalam Pasal 107 ayat 3 menyatakan bahwa dalam hal pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak melalui likuidasi maka :

- a. aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan hasil penggabungan.
- b. Pemegang saham dari perseroan yang digabungkan atau meleburkan diri menjadi pemegang saham dari perseroan hasil penggabungan atau peleburan.

Merger dan konsolidasi di Indonesia umumnya dilakukan dalam rangka melakukan efisiensi dan pemeliharaan kesehatan kehidupan kelembagaan badan usaha. Demikian halnya dengan badan-badan usaha milik negara termasuk didalamnya lembaga Perbankan.

Kebijaksanaan merger Bank BUMN pada dasarnya ditujukan dalam upaya penggabungan bisnis **Perbankan** yang efisien dan profesional.<sup>7</sup>

Adapun yang melatar belakangi dilakukannya penggabungan dua atau lebih badan usaha Perbankan menjadi satu bank antar lain untuk menjaga kesehatan bank. Hal tersebut sangat penting mengingat bahwa majunya kehidupan Perbankan didasarkan atas kepercayaan masyarakat dan kepercayaan tersebut akan terpelihara secara meningkat jika ada jaminan kesehatan bank yang bersangkutan. Dalam rangka itulah maka berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Bank Indonesia mewajibkan kepada bank untuk menyampaikan laporan keuangan serta penjelasannya yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank.

Jika melihat Pasal 37 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka merger atau konsolidasi sebagaimana dimaksudkan adalah sebagai penyelamat bank bermasalah untuk menghindari likuidasi yang akan lebih banyak menimbulkan kerugian dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan serta juga dapat menghambat kegiatan bisnis lainnya.

Dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK/017/1993 tentang Persyaratan dan Tata cara Merger Konsolidasi dan Akuisisi Bank, dinyatakan bahwa merger atau konsolidasi antar bank dan akuisisi bank dapat berlangsung baik, dalam rangka mengatasi masalah kesehatan bank maupun karena kekuasaan usaha. Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 740/KMK/00/1989 merger atau konsolidasi merupakan

---

<sup>7</sup> Heru Soeprapto, 1987, Kebijakan Merger dan Akuisisi di Sektor Perbankan Untuk Meningkatkan Efisiensi Usaha, Seminar Sehari Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta, hal. 9

suatu tindakan Restrukturisasi Perseroan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan melalui perubahan status hukum, organisasi dan kepemilikan saham.

Dengan demikian tindakan penggabungan peleburan atau pengambilalihan merupakan strategi memajukan dan mengefektifkan perseroan dalam menjalankan usahanya mencapai tujuan yang diinginkan tanpa melalui prosedur pemberesan akibat likuidasi.<sup>8</sup>

Menurut Heru Soepratomo, SH dengan dilakukannya merger maka akan diperoleh :

1. Pooling kekuatan / alat untuk meningkatkan skala ekonomi.

Dengan menggabungkan beberapa bank menjadi satu, permodalan dan kapasitas bank akan menjadi lebih baik sehingga dapat lebih bersaing.

2. Komplementasi

Dengan menggabungkan beberapa bank dapat diperoleh sinergi karena saling mengisi dan melengkapi sehingga memperkuat posisi management bank dalam persaingan industri perbankan melalui peningkatan kualitas management.

3. Peningkatan volume usaha bank hasil merger karena merupakan penggabungan aktiva dan hutang – hutang bank hasil merger atau konsolidasi.

---

<sup>8</sup> Abdul Kadir Muhammad, 1996, Hukum Perseroan Terbatas, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 92

4. Secara cepat bank hasil merger telah menambah tenaga berpengalaman dalam operasional perbankan sehingga mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan usahanya dengan segera.
5. Dari sisi pemasaran bank hasil merger secara tidak langsung telah memperluas jaringan operasionalnya karena bertambahnya jaringan kantor yang telah ada sehingga mempunyai kesempatan untuk meningkatkan usahanya dengan segera.
6. Dalam kasus tertentu merger dapat mencegah perusahaan dari kebangkrutan, dengan cara merger dengan bank yang lebih kuat dan sehat struktur keuangannya.
7. Dari hasil merger akan diperoleh bank yang cukup besar yang diharapkan dapat membantu penyelesaian bank – bank kecil tanpa menggunakan dana Bank Indonesia.
8. Dapat membuka peluang berperan serta di dunia internasional.
9. Memperkecil kompetitor.<sup>9</sup>

Namun demikian pelaksanaan merger atau konsolidasi yang merupakan salah satu bentuk pengembangan usaha yang didasarkan pada peningkatan efisiensi tidak diperbolehkan membawa akibat terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana, diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

<sup>9</sup> Heru Soeprapto, 1987, Kebijakan Merger, Akuisisi di Sektor Perbankan Untuk Meningkatkan Efisiensi Usaha, Seminar Sehari Fakultas Ekonomi Universitas Byangkara, Jakarta, hal. 9-10

Pengertian dari praktek monopoli sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang tersebut yakni suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pemusatan kekuatan ekonomi adalah pemusatan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa (Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 5 Tahun 1999 ).

Sedangkan Persainagan usaha tidak sehat adalah persaingan usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha ( Pasal 1 ayat 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 )

Dari pengertian diatas bahwa salah satu prasyarat pokok telah terjadi suatu pemusatan kekuatan ekonomi adalah terjadinya penguasaan nyata dari suatu pasar bersangkutan sehingga harga dari barang atau jasa yang diperdagangkan tidak lagi mengikuti hukum ekonomi mengenai permintaan dan penawaran melainkan semata-mata ditentukan oleh satu atau lebih pelaku ekonomi yang menguasai pasar tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Gunawan Widjaja, *Merger Dalam Perspektif Monopoli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 22



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. TENTANG KELEMBAGAAN BADAN USAHA PERBANKAN**

##### **I. Pengaturan Kelembagaan Badan Usaha Perbankan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.**

Mengenai Badan Usaha Perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 hanya meliputi ketentuan-ketentuan yang tidak diatur dalam Undang-Undang Perbankan ( UU No. 10 Th. 1998 ) yakni :

- a. Tentang pengertian Perseroan Terbatas ( Pasal 1 angka 1 UU No.1 / 1995 ).  
Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Tentang status Badan Hukum ( Pasal 7 ayat 6 UU No. 1 / 1995 ).  
Perseroan memperoleh status Badan Hukum setelah Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris dalam Bahasa Indonesia disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- c. Tentang Pendaftaran dan Pengumuman ( Pasal 21 dan Pasal 22 UU No. 1 / 1995 ). Akta Pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direksi wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Maksud dilakukannya pengumuman tersebut agar Perseroan Terbatas yang telah disahkan menjadi sempurna sebagai Badan Hukum tanpa membebani Direksi dengan tanggung jawab secara tanggung renteng atas segala perbuatan yang dilakukannya.

d. Tentang tanggung jawab pemegang saham.

Perseroan terbatas yang merupakan suatu badan hukum ( legal entity ) yaitu badan hukum “Mandiri” ( Persona Standi in Judicio ) selain memiliki karakteristik

- a. sebagai asosiasi modal
- b. kekayaan dan utang perseroan adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham
- c. adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus
- d. memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas
- e. kekuasaan tertinggi berada pada RUPS

Juga memiliki karakteristik bahwa pemegang saham bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan atau tanggung jawab terbatas ( limited liability ), tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambarnya dan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan<sup>11</sup>.

Hal tersebut diatas sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang berbunyi :

---

<sup>11</sup> I.E Rai widjaya, Hukum Perusahaan, Kesaint Blanc, Bekasi Timur, 2000, hal 143

“ Pemegang saham perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perusahaan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang diambil.”

Namun demikian dalam hal-hal tertentu, tidak tertutup kemungkinan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham bisa hapus. Hal tertentu tersebut maksudnya antara lain apabila terbukti bahwa terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, sehingga perusahaan atau PT didirikan semata-mata hanya sebagai alat yang dipergunakan oleh pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya.

Sesuai dengan bunyi Pasal 3 ayat 2 UU Nomor 1 / 1995, tanggung jawab terbatas pemegang saham hapus atau tidak berlaku apabila :

- a. persyaratan PT sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi
- b. pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi
- c. pemegang saham terikat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan atau
- d. pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan jadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Hal tersebut diatas dikenal dengan sebutan istilah “ piercing the corporate veil “ sehingga dengan demikian maka pemegang saham harus bertanggung jawab penuh secara pribadi

e. Tentang perubahan Anggaran Dasar (Pasal 14 dan Pasal 15).

Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Usul adanya perubahan Anggaran Dasar dicantumkan dalam Surat Panggilan atau Pengumuman untuk mengadakan RUPS.

Perubahan tertentu Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan Menteri Kehakiman serta diumumkan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

Adapun tentang perubahan meliputi:

- 1). Nama Perseroan
- 2). Maksud dan Tujuan Perseroan
- 3). Jangka waktu berdirinya Perseroan, apabila Anggaran Dasar menetapkan jangka waktu tertentu
- 4). Besarnya modal dasar
- 5). Pengurangan modal ditempatkan dan disetor
- 6). Status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana tersebut diatas cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak keputusan RUPS dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana tersebut diatas harus dibuat secara nota riil dan dalam bahasa Indonesia.

f. Tentang Penambahan Modal dan Pengurangan Modal (Pasal 34-Pasal 41 UU Nomor 1 / 1995 ).

- 1). Penambahan Modal hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.

Keputusan RUPS sah apabila dilakukan sesuai ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum dan jumlah suara untuk perubahan Anggaran Dasar disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar.

Dalam hal Anggaran Dasar tidak menentukan lain, seluruh saham yang dikeluarkan dalam penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang lama.

Apabila pemegang saham tidak menggunakan hak untuk membeli saham maka setelah lewat waktu 14 hari terhitung sejak penawaran, perseroan menawarkan kepada karyawan mendahului penawaran kepada orang lain untuk membeli jumlah tertentu atas saham tersebut.

- 2). Pengurangan modal hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan panggilan rapat, kuorum dan jumlah suara untuk perubahan Anggaran Dasar, sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar. Selanjutnya Direksi wajib memberikan secara tertulis keputusan RUPS

tersebut kepada semua kreditur dan mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan.

Dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pengumuman kreditur dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada perseroan atas keputusan pengurangan modal dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman, dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keberatan diterima perseroan wajib memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan disertai alasannya.

Dalam hal perseroan menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditur, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak jawaban perseroan diterima, kreditur dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri di daerah hukum dimana perseroan tersebut berkedudukan.

Pengurangan modal berlaku setelah perubahan Anggaran Dasar disetujui oleh Menteri Kehakiman.

g. Tentang Organ Perseroan

Sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya perseroan terbatas dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang perorangan dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi, yang hanya mungkin dilaksanakan oleh orang perorangan, seperti yang diatur dalam Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan sebagian dari Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Kewarisan.

Guna melaksanakan segala hak dan kewajiban tersebut, ilmu hukum telah merumuskan fungsi dan tugas dari masing-masing organ perseroan tersebut yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Organ-organ tersebut kita kenal dengan sebutan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris<sup>12</sup>

Namun demikian disini hanya akan diuraikan tentang ketentuan mengenai wewenang dan macam RUPS kecuali telah ditentukan lain dalam hal pengaturan tentang BUMN. Sedangkan pengaturan tentang Direksi dan Komisaris telah diatur dalam Undang-undang Perbankan.

RUPS merupakan organ perseroan yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris.

RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan.

Kewenangan tersebut merupakan wewenang eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada orang lain yang telah ditetapkan dalam UUPT dan Anggaran Dasar. Wewenang eksklusif yang ditetapkan dalam UUPT akan ada selama UUPT belum diubah. Sedangkan kewenangan eksklusif dalam Anggaran Dasar yang disahkan atau disetujui Menteri Kehakiman dapat diubah melalui perubahan Anggaran Dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UUPT.

---

<sup>12</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, Perseroan Terbatas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.

Beberapa wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam UUPT antara lain :

1. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris
2. Penetapan perubahan Anggaran Dasar
3. Pengurangan Modal
4. Penetapan penggunaan laba
5. Pemeriksaan, persetujuan dan pengesahan laporan tahunan
6. Penetapan tentang penggabungan, pelimpahan dan pengambil alihan
7. Penetapan pembubaran Perseroan<sup>13</sup>

Sedang macam-macam RUPS yakni :

1. RUPS tahunan, diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku, dan dalam RUPS tahunan tersebut harus diajukan semua dokumen perseroan.
2. RUPS lainnya (dalam ilmu hukum dikenal dengan nama RUPS luar biasa) hanya diselenggarakan secara khusus atas permintaan Direksi, komisaris maupun pemegang saham.

## **II. Pengaturan Kelembagaan Badan Usaha Perbankan di dalam Undang-Undang Perbankan**

Terhadap badan usaha yang bergerak dalam bidang Perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya. Perseroan Terbatas. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 78



a. Pasal 1 angka 2 UU Nomor 10 / 1998 tentang pengertian Bank yakni :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

b. Jenis usaha dan Bentuk Hukum

Dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan, Bank menurut jenisnya dibagi 2 yaitu :

1). Bank Umum

Hal ini dijabarkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Perbankan (UU No. 10 Th. 1998). yang mengemukakan Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan yang dimaksud dengan konvensional adalah usaha perbankan memberikan kredit kepada nasabah baik perorangan maupun perusahaan.

2). Bank Perkreditan Rakyat

Hal ini dijabarkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perbankan (UU No. 10 Th. 1998) yang mengemukakan Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Mengenai bentuk hukum suatu Bank umum sesuai dengan Pasal 21 Undang-undang Perbankan (UU Nomor 10 Th. 1998), dapat berupa salah satu dari :

1. Perseroan Terbatas
2. Koperasi atau
3. Perusahaan Daerah

Sedangkan bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari:

1. Perusahaan Daerah
2. Koperasi
3. Perseroan Terbatas
4. Bentuk lain yang ditetapkan dengan PP<sup>14</sup>

#### c. Ijin Pendirian

Setiap pendirian Perseroan Terbatas di bidang Perbankan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 6 Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) harus terlebih dahulu akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman untuk mendapat statusnya sebagai Badan Hukum . Selanjutnya berdasarkan pasal 16 Undang-undang Perbankan (UU Nomor 10 Tahun 1998). Pendirian di bidang Perbankan tersebut harus memperoleh ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi guna memperoleh ijin usaha yaitu:

- 1) Susunan organisasi dan kepengurusan

---

<sup>14</sup> Santosa Sumbaning, SH,MH, Hukum Perbankan,CV.Mandar Maju/2000/Bandung.Hal. 33

- 2) Permodalan
- 3) Kepemilikan
- 4) Keahlian di bidang Perbankan
- 5) Kelayakan rencana kerja

Mengenai pemberian ijin usaha bagi Bank Umum sesuai Pasal 6 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 32/33/Kep.Dir. tanggal 12-05-1999 tentang Bank Umum, bahwa Bank Umum untuk dapat menjalankan tugas usahanya harus melalui 2 ( dua ) tahap yaitu :

1. Persetujuan prinsip yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank.

Sedangkan untuk mendapatkan persetujuan prinsip permohonan wajib dilampiri dengan :

- 1.1. Rancangan akta pendirian badan hukum , termasuk rancangan anggaran dasar yang sekurang-kurangnya memuat :

- Nama dan tempat kedudukan
- Kegiatan usaha sebagai bank
- Permodalan
- Kepemilikan
- Wewenang tanggung jawab dan masa jabatan Dewan Komisaris serta direksi.

- 1.2. Data kepemilikan berupa :

- Daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi bank yang berbentuk hukum

Perseroan Terbatas / Perusahaan daerah.

- Daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah bagi bank yang berbentuk hukum koperasi.

1.3. Daftar calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, disertai dengan :

- Foto copy tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk atau paspor
- Riwayat hidup
- Surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang Perbankan, keuangan dan usaha lainnya / atau tidak pernah dihukum, karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan
- Surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat kerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan bagi calon Direksi yang telah berpengalaman.
- Surat keterangan dari lembaga pendirian tentang pendidikan perbankan yang telah diikuti dan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang perbankan, bagi calon anggota Dewan Komisaris.

1.4. Rencana susunan organisasi

1.5. Rencana kerja untuk tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat :

- Hasil penelaahan tentang peluang pasar dan potensi ekonomi.
- Rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud.
- Rencana kebutuhan pegawai
- Proyeksi awal bulanan selama 12 bulan yang dimulai sejak bank melakukan kegiatan operasional serta proyeksi neraca dan laba rugi

1.6. Bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% dari modal disetor minimum Rp. 3.000.000.000.000 ( tiga triliun rupiah ) dalam bentuk foto copy bilyet deposito pada Bank Indonesia.

1.7. Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas / Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi bank yang berbentuk Hukum Koperasi , bahwa setoran modal tersebut :

- Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain di Indonesia.
- Tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

2. Ijin Usaha yaitu ijin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan pendirian bank tersebut selesai dilakukan. Permohonan untuk mendapatkan ijin usaha tersebut diajukan oleh Direksi Bank kepada Direksi Bank Indonesia dan wajib dilampiri dengan :

2.1. Akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang.

2.2. Data kepemilikan berupa :

- Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas / Perusahaan Daerah atau
- Daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah bagi bank yang berbentuk hukum koperasi.

2.3. Daftar susunan Dewan Komisaris dan Direksi disertai dengan :

- Pas photo terakhir ukuran 4 x 6
- Contoh tanda tangan dan paraf
- Dokumen daftar calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- Foto copy kartu ijin menetap sementara dan foto copy surat ijin bekerja dari instansi berwenang bagi warga negara asing.

2.4. Susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja termasuk susunan personalia.

2.5. Bukti pelunasan modal disetor minimum, dalam bentuk foto copy bilyet deposito pada Bank Indonesia.

2.6. Bukti kesiapan operasional antara lain berupa :

- Daftar aktiva tetap dan inventaris

- Bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa menyewa gedung kantor.
- Foto gedung kantor dan tata letak ruangan.
- Contoh formulir / warkat yang akan digunakan untuk operasional bank.
- Nomor pokok wajib pajak dan tanda daftar perusahaan.

2.7. Surat pernyataan dari Pemegang Saham bagi bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas / Perusahaan Daerah atau dan anggota bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, bahwa pelunasan modal disetor :

- tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan / atau pihak lain di Indonesia.
- Tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

2.8. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan bagi anggota dewan Komisaris.

2.9. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan bagi anggota Direksi.

2.10. Surat pernyataan dari anggota dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk suami / istri, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lain.

2.11. Surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua

termasuk suami / istri, keponakan, menantu, ipar dan besan dengan anggota Direksi lain atau dewan Komisaris.

2.12. Surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan lain.

#### d. Modal Perseroan

Sejalan dengan apa yang dinamakan Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), maka dengan tegas dalam Pasal 24 ayat 1 UUPT ditentukan modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham, tetapi tidak dijelaskan dalam Undang-undang tentang apa pengertian Modal Dasar.

Namun demikian dengan mengacu pada pendapat Prof.DR.H. Rachmat Soemitro,SH, RT,Sutantya R, Hadhi Kusuma,SH dan DR. Sumantoro, bahwa modal dasar adalah jumlah yang akan disebut dalam akta pendirian. Besarnya jumlah yang tercantum dalam akta tersebut merupakan jumlah maksimal modal dasar perseroan, jumlah ini tidak menggambarkan kekuatan finansial dari suatu Perseroan Terbatas, melainkan hanya memperlihatkan jumlah nominal dari semua saham yang dikeluarkan menurut anggaran dasarnya<sup>15</sup>

Untuk mendirikan Perseroan Terbatas ditetapkan dalam Pasal 25 ayat 1 UUPT paling sedikit modal dasar adalah Rp. 20.000.000,-. Namun demikian untuk bidang usaha tertentu seperti halnya pendirian perseroan di

<sup>15</sup> Gatot Supramono SH. Hukum Perseroan Terbatas yang baru, Jakarta Djambatan 1999, hal.37



bidang Perbankan ketentuan jumlah minimal modal dasar berbeda dengan Perseroan yang bergerak di bidang perdagangan.

Bentuk persyaratan modal disetor guna pendirian Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum ditetapkan modal disetor untuk mendirikan Bank sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga trilyun rupiah)

e. Tentang Direksi dan Komisaris

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999, tentang Bank, persyaratan untuk menjadi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Pasal 19, 21, 22, sebagai berikut:

- 1). Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan sesuai dengan yang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 2). Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya.
- 3). Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik.
- 4). Mayoritas dari anggota Direksi wajib berpengalaman operasional Bank sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank.
- 5). Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki pengetahuan dan / atau pengalaman di bidang perbankan.

Pengalaman bagi Direksi Bank merupakan persyaratan yang harus dipenuhi karena Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung

jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan sehingga profesionalitas atas kualitas Direksi sangat diperlukan. Persyaratan Direksi sebagaimana tersebut diatas tidak dijumpai bagi Direksi perseroan yang diatur dalam UUPT.

Disamping persyaratan-persyaratan tersebut diatas khusus bagi Direksi Bank masih terdapat larangan-larangan yang diatur dalam Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 32/33/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999, tentang Bank Umum yaitu :

- 1). Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga Perbankan, Perusahaan atau Lembaga lain.
- 2). Anggota Direksi dilarang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 50% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
- 3). Direksi Bank dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- 4). Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk suami/istri, keponakan, menantu, ipar dan besan dengan anggota Direksi lain atau anggota Dewan Komisaris.

**f. Tentang Laporan Keuangan dan Pemeriksaan**

**1). Laporan Keuangan**

Bagi Bank Umum selain harus menyampaikan laporan keuangan tahunan juga harus menyusun laporan keuangan publikasi.

Hal tersebut diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/119/Kep/Dir tanggal 26 Januari 1995 yang merupakan penjabaran Pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Penyampaian laporan tersebut diatas kepada Bank Indoensia terlebih dahulu harus di audit oleh Akuntan Publik dan disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya akhir April setiap tahun.

Akuntan Publik yang diberi tugas untuk mengaudit harus merupakan Akuntan yang telah terdaftar di Bank Indonesia sehingga dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi ketentuan rahasia Bank. Selanjutnya Bank wajib mengumumkan laporan keuangan publikasi berupa laporan keuangan posisi akhir bulan Desember sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

Publikasi tersebut harus dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian Bahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas ditempat kedudukan kantor pusat atau ditempat kedudukan kantor cabang bagi Bank yang berkedudukan di luar negeri.

Bila Bank tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan dan tidak melakukan publikasi dikenakan sanksi wajib membayar setingginya Rp. 2.000.000,- dan bagi Bank yang terlambat menyampaikan laporan keuangan publikasi dikenakan denda Rp. 1.000.000,-

## 2. Pemeriksaan

Berdasarkan Pasal 10 UUPT pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam

hal terdapat dugaan anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak lain.

Pemeriksaan dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.

Pemeriksaan terhadap Perbankan telah diatur dalam Undang-undang Perbankan Pasal 29 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan kemudian dijabarkan didalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/52/KEP/DIR tanggal 3 Agustus 1994 yang pada dasarnya diatur tentang Pembinaan dan Pengawasan Bank.

Bank Indonesia sebagai Pembina dan Pengawas Perbankan mempunyai kepentingan agar Bank sebagai badan usaha yang melindungi kepentingan pengguna jasa bank dapat memelihara prinsip-prinsip dan sistem perbankan yang sehat, sehingga terhadap perbankan perlu diadakan pengawasan langsung oleh Bank Indonesia didalam rangka:

- 1). Memastikan ketaatan bahwa ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang wajib ditaati.
- 2). Mendapatkan keyakinan atas kebenaran laporan yang disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia dan laporan Bank yang dipublikasikan kepada masyarakat.
- 3). Mendapatkan keterangan yang menyeluruh tentang perkembangan dan keadaan keuangan Bank.

- 4). Mendeteksi terjadinya hal-hal yang mempengaruhi tingkat kesehatan Bank yang meliputi permodalan, kualitas, aktiva, produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas.

## **B. TINJAUAN TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)**

Setiap pendirian Perseroan Terbatas di bidang BUMN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah artinya bahwa sejak proses awal pendirian perseroan dilakukan sendiri oleh pemerintah, sehingga sering dikatakan bahwa unsur politik merupakan sifat yang tidak dapat dipisahkan dan selalu mempengaruhi pengelolaan BUMN.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 740/KMK-00/1989 tentang Peningkatan Efisiensi dan Produktifitas BUMN. Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara ialah Badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki negara atau badan usaha yang tidak seluruh sahamnya dimiliki negara tetapi statusnya disamakan dengan Badan Usaha Milik Negara yaitu :

- 1). BUMN yang merupakan patungan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
- 2). BUMN yang merupakan patungan antara BUMN dengan BUMN lainnya.
- 3). BUMN yang merupakan patungan antara badan-badan usaha patungan swasta nasional/asing dimana negara memiliki saham mayoritas minimal 51%.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara di dalam Pasal 1 Usaha-usaha Negara berbentuk

Perusahaan dibedakan dalam :

- 1). Perusahaan Jawatan (PERJAN)
- 2). Perusahaan Umum (PERUM)
- 3). Perusahaan Perseroan (PESERO)

Mengingat bahwa Perusahaan Perseroan (PESERO) erat kaitannya dengan penulisan tesis maka penulis hanya akan membahas tentang Perusahaan Perseroan.

Perusahaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 adalah Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang seluruh saham maupun sebagian sahamnya dimiliki oleh negara.

Mengingat bahwa Perusahaan Perseroan berbentuk Perseroan Terbatas maka ketentuan yang ada dalam Perseroan Terbatas berlaku terhadap Perusahaan Perseroan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Perusahaan Perseroan tunduk pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan.

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa Perusahaan Perseroan BUMN dapat didirikan oleh satu pemegang saham yakni Negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 Menteri Keuangan ditunjuk untuk mewakili Negara selaku pemegang saham dari setiap penyertaan modal negara dalam perseroan terbatas.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 menyatakan bahwa dalam hal modal perusahaan perseroan untuk seluruhnya merupakan milik negara maka ditunjuk seseorang untuk ikut serta mendirikan perusahaan perseroan.

Mengenai proses pendirian perusahaan perseroan harus dilakukan dihadapan Notaris dan Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan untuk mewakili Negara disertai hak substitusi kepada Menteri yang bidangnya sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha perusahaan perseroan tersebut dengan ketentuan rancangan anggaran dasar perusahaan harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tanggal 17 Januari 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) maka Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1990 dan Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dinyatakan dicabut.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 menyatakan bahwa Perusahaan Perseroan adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1955 yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % saham yang dikeluarkan dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung.

Di dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah ini disusun sepenuhnya berdasarkan

ketentuan yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995** tentang Perseroan Terbatas, hanya saja Peraturan Pemerintah ini memberi pengaturan khusus yang berkaitan dengan karakter Perusahaan Perseroan sebagai Perseroan Terbatas yang sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Negara.

Meskipun Perusahaan Perseroan adalah Badan Usaha Milik Negara yang secara khusus modalnya dimiliki oleh negara namun terhadap Perusahaan Perseroan tersebut berlaku prinsip-prinsip Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

Hal ini berarti dalam hal pendirian Perusahaan Perseroan Menteri Keuangan bertindak mewakili Negara atau dapat memberi kuasa kepada Menteri lain yang sesuai dengan sektor usaha Perusahaan Perseroan untuk menghadap Notaris sebagai pendiri mewakili Negara. Namun sebelum menghadap Notaris Rancangan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan yang akan dituangkan dalam akta pendirian harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Menteri Keuangan.

Jadi apabila Negara menyertakan modal dalam pendirian Perusahaan Perseroan, maka tindakan tersebut dapat diurutkan sebagai berikut:

- 1). Penyertaan modalnya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah.
- 2). Menteri Keuangan menyetujui Rancangan Anggaran Dasar
- 3). Menteri Keuangan atau Menteri lain diberi kuasa membawa Rancangan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan menghadap Notaris untuk dibuatkan akta pendiriannya.



- 4). Dan seterusnya berlaku prosedur Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995<sup>16</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan diatur antara lain bahwa:

Perusahaan Perseroan dipimpin oleh Direksi dan dalam menjalankan tugasnya diawasi dan mendapat nasehat dari Komisaris.

Direksi dan Komisaris diangkat oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri yang bidangnya sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha Perusahaan Perseroan tersebut.

Direksi terdiri atas Direktur Utama dan Direktur. Direktur dan dalam Perusahaan Perseroan dibentuk Dewan Komisaris yang bertanggung jawab kepada :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal tidak seluruh saham dimiliki oleh Negara.
- b. Menteri Keuangan melalui Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh saham dimiliki oleh Negara.

Perusahaan Perseroan dalam melakukan tindakan tertentu harus mendapat ijin dari Menteri Keuangan selaku pemegang saham atas nama Pemerintah. Untuk itulah Menteri Departemen tersebut yang membawahi Perusahaan Perseroan tersebut harus memperoleh ijin dari Menteri Keuangan seperti halnya sebelum

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. Hal. 111

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- 1). Rencana perubahan jumlah modal saham
- 2). Rencana penjualan serta pemindahtanganan atau pembebanan aktiva tetap Perusahaan Perseroan.
- 3) Rencana penyertaan modal atau pelepasan penyertaan modal Perusahaan Perseroan dalam Perseroan Terbatas atau Badan Usaha lain.
- 4). Rencana pendirian anak perusahaan
- 5). Rencana pelepasan sebagian atau seluruh saham Perusahaan Perseroan
- 6). Rencana menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan rencana pemberian pinjaman jangka menengah/panjang dan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- 7). Rencana likuidasi, penggabungan atau reorganisasi Perusahaan Perseroan dalam bentuk lain.
- 8). Rencana Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan dan perubahannya.
- 9). Rencana Perusahaan Perseroan mengadakan kontrak management, kontrak lisensi atau kontrak-kontrak sejenisnya dengan badan usaha/pihak lain.
- 10). Rencana penetapan dan pembagian laba Perusahaan Perseroan.
- 11). Rencana penetapan gaji Direksi, berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya, termasuk pensiun.

- 12). Rencana untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan penghapusan persediaan barang yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Dengan berlakunya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan maka ketentuan-ketentuan yang mengatur organ Perusahaan Perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris berlaku prinsip-prinsip Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, namun mengingat bahwa modal Perusahaan Perseroan dimiliki seluruhnya oleh Negara maka Menteri Keuangan berkedudukan sebagai Rapat Umum Pemegang Saham yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris.

Meskipun Perusahaan Perseroan tersebut menganut prinsip-prinsip Perseroan Terbatas namun terdapat beberapa pengecualian yang menyangkut karakter Perusahaan Perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara.

- a. Pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada Direktorat Jendral Pembinaan Badan Usaha Milik Negara, perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Perusahaan Perseroan dan pihak Direktorat Jendral Pembinaan Badan Usaha Milik Negara selaku penerima kuasa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan dalam hal mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tentang:

- 1). Perubahan jumlah modal
- 2). Perubahan Anggaran Dasar
- 3). Rencana pembagian dan penggunaan laba
- 4). Penggabungan, peleburan dan pemecahan Perusahaan Perseroan.
- 5). Investasi dan pembiayaan jangka panjang
- 6). Kerjasama Perusahaan Perseroan
- 7). Pembentukan anak perusahaan dan penyertaan
- 8). Pengalihan Aktiva

- b. Pasal 34 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 yang mengatur bahwa Menteri Keuangan menyelenggarakan penata usahaan setiap penyertaan modal negara berikut perubahannya kedalam modal saham Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyertaan-penyertaan yang dilakukan oleh Perusahaan Perseroan tersebut dan pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Direktur Jendral Pembinaan Badan Usaha Milik Negara.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 tentang pengalihan kedudukan tugas dan kewenangan Menteri Keuangan selaku pemegang saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara pada tanggal 13 April 1998 maka kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan yang mewakili pemerintah selaku pemegang saham atau Rapat Umum Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan dialihkan kepada Menteri Negara Pendayagunaan

Badan Usaha Milik Negara namun bagi Perusahaan Perseroan tertentu dapat dilakukan pengecualian yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Hal tersebut mengingat masih terdapat upaya-upaya peninjauan yang perlu dilakukan secara khusus sehingga untuk Perusahaan Perseroan tersebut masih berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998.

Disamping hal tersebut diatas didalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 diatur pula bahwa pengalihan kedudukan , tugas dan kewenangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas tidak meliputi kegiatan penata usahaan setiap penyertaan modal negara berikut perubahannya kedalam Perusahaan Perseroan, Perseroan terbatas lainnya dan penyertaan-penyertaan yang dilakukan oleh Perusahaan Perseroan , yang tetap dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan perkataan lain penata usahaan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana tersebut diatas tidak termasuk kewenangan Menteri Keuangan yang dialihkan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara.

### **C. MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI**

Ketentuan yang mengatur tentang merger, konsolidasi dan akuisisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Pasal 102 sampai dengan Pasal 109. Hal tersebut mendapat angin segar dalam hukum positif di Indonesia karena undang-undang untuk yang pertama kali mengatur tentang merger perusahaan secara umum dan terintegrasi, walaupun

sebelumnya secara sektoral sudah ada ketentuan tentang merger<sup>17</sup>, sehingga bisa dikatakan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas merupakan pioner pengaturan merger, konsolidasi dan akuisisi.

Maksud dari pioner disini bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 merupakan perundang-undangan yang pertama di Indonesia yang mengatur tentang Merger.

Sebelum undang-undang Perseroan Terbatas tersebut, tentang merger secara umumnya ini belum pernah diatur yang ada hanya pengaturan merger secara sektoral yaitu pengaturan khusus untuk merger bank, yakni seperti yang tertuang dalam perundang-undangan di bidang perbankan. yang memang telah ada sebelum lahirnya undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995.

Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dimana diaturnya ketentuan tentang Perseroan Terbatas sebelum Undang-undang Perseroan Terbatas, tidak ditemukan satu pasalpun yang mengatur tentang merger<sup>18</sup>

Disamping ketentuan tersebut diatas merger, konsolidasi dan akuisisi diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan dan pengambil alihan Perseroan Terbatas yang mengejawantahkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995.

Dibidang Perbankan ketentuan merger, konsolidasi dan akuisisi selain diatur pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas juga diatur secara khusus dalam :

---

<sup>17</sup> Ibid hal. 113

<sup>18</sup> Munir Fuady, Hukum Tentang Merger, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995. Hal. 114

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999, tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.
- c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 / KMK. 017 / 1993 tanggal 26-2-1993 tentang persyaratan dan tata cara merger, konsolidasi dan akuisisi bank.
- d. SK Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/DIR Tanggal 11 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum.
- e. SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat.

### **1. Pengertian Merger, Konsolidasi dan Akuisisi**

Mengenai pengertian tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dapat diketahui dalam Pasal 102 ayat 1 dan Pasal 103 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa satu perseroan atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan perseroan lain yang telah ada atau meleburkan diri dengan perseroan lain dan membentuk perseroan baru. Sedangkan pengambil alihan perseroan dapat dilakukan oleh Badan Hukum atau orang perorangan dan dapat dilakukan melalui pengambil alihan seluruh atau sebagian besar saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atau pengelolaan terhadap perseroan tersebut.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak menyebutkan tentang pengertian merger, konsolidasi dan akuisisi namun hanya mengatur bahwa pelaksanaan merger, konsolidasi dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat ijin pimpinan Bank Indonesia dan ketentuannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pengertian merger, konsolidasi dan akuisisi sesuai dengan ketentuan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 / KMK. 017 / 1993 tanggal 26-2-1993 menyebutkan bahwa

- a. Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan melikuidasi bank-bank lainya.
- b. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan melikuidasi bank yang ada.
- c. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank.

Sedangkan pengertian Merger, Konsolidasi dan Akuisisi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 dan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 menyebutkan bahwa:

- a. Merger adalah Penggabungan dari 2 (dua) Bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.



- b. Konsolidasi adalah Penggabungan dari 2 (dua) bank atau lebih dengan cara mendirikan Bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu.
- c. Akuisisi adalah Pengambil alihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Bank.

Dari pengertian Merger dan Konsolidasi tersebut diatas maka perbuatan hukum Merger dan Konsolidasi mengandung makna penyatuan dua perseroan atau lebih. Penggabungan adalah penyatuan dua perseroan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu perseroan dan membubarkan perseroan lainnya.

Peleburan adalah penyatuan dua perseroan atau lebih dengan cara mendirikan perseroan baru dan membubarkan perseroan yang ada.

Disamping pengertian tersebut diatas maka Prof. Abdul Kadir Muhammad,SH membedakan antara Merger ( Penggabungan ) dan Konsolidasi (Peleburan) sebagai berikut:

- a). Pada Penggabungan masih dipertahankan salah satu perseroan yang ada, sedangkan
- b). Pada Peleburan semua Perseroan yang ada dibubarkan dan didirikan Perseroan baru.
- c). Pada Penggabungan hanya dibutuhkan Pengubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah ada jadi hanya memerlukan persetujuan Menteri

Kehakiman, sedangkan pada Peleburan dibutuhkan pembuatan Akta Pendirian yang memerlukan pengesahan Menteri Kehakiman<sup>19</sup>

Dibandingkan dengan penggabungan dan peleburan pada pengambil alihan baik perseroan pembeli maupun perseroan penjual tetap seperti biasa. tidak berubah status. Yang berubah hanya status pemilikan saham yaitu beralih dari pemegang saham perseroan terakuisisi kepada pemegang saham perseroan pengakuisisi.

Jadi perubahan yang timbul bukan pada status perseroan tetapi pada status pemegang saham. Selain itu, pengambil alihan berakibat beralihnya pengendalian dari perseroan terakuisisi kepada perseroan pengakuisisi atau dengan perkataan lain perseroan terambil alih jadi anak perseroan pengambil alih<sup>20</sup>.

Merger, konsolidasi dan akuisisi merupakan bentuk kerja sama antara perusahaan-perusahaan. Kerja sama tersebut diusahakan sedemikian rupa sehingga ada bentuk-bentuk tersendiri yang dapat menuju pada terjadinya hubungan-hubungan yang dibedakan satu dengan yang lain seperti fusi atau merger, joint venture , akuisisi dan pendirian perusahaan anak<sup>21</sup>.

Merger atau fusi adalah salah satu bentuk kerjasama antara perusahaan. Dalam fusi kerjasama mencakup kegiatan yang bersifat penuh. Ini berarti bahwa pada perusahaan yang melakukan fusi, kemandirian pihak-pihak yang

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, 1996. Hukum Perseroan Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 85-86

<sup>20</sup> Ibid hal. 89

<sup>21</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1994 Perusahaan Kelompok ( Group Company / Concern ), Saksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajahmada Yogyakarta, hal. 11

berfusi tidak ada lagi melainkan perusahaan yang berfusi itu yang satu melebur pada yang lain<sup>22</sup>.

Menurut Raaymaker di dalam praktek perusahaan yang berfusi kedalam perusahaan lain jarang menjadi lebur dan diikuti dengan likuidasi dari badan hukumnya. Perusahaan yang bergabung yang berfusi itu masih tetap dibiarkan aktif dan secara organisatoris disesuaikan ke dalam keseluruhan kesatuan ekonomi dari perusahaan yang menerima penggabungan perusahaan itu<sup>23</sup>.

Pengambilalihan atau akuisisi mempunyai beberapa perbedaan dengan fusi. Perbedaan tersebut adalah karena pada umumnya dianggap bahwa pada fusi perusahaan-perusahaan yang bekerja sama berada dalam semua tingkat sedangkan pada akuisisi perusahaan-perusahaan itu tidak sama tingkat.

Dalam pengambilalihan biasanya perusahaan yang lebih kuat secara ekonomis akan mengambilalih kontrol terhadap perusahaan yang lemah. Dalam hal terjadi fusi yang diperlukan **adalah** kesepakatan dan kesediaan diantara pimpinan perusahaan yang bersangkutan untuk kerjasama sedangkan pada pengambilalihan terjadinya dapat secara bersahabat dan secara terpaksa, akan tetapi dalam praktek perbedaan antara fusi dengan pengambilalihan tidak dapat selalu dilihat dengan mudah dan jelas<sup>24</sup>.

## **2. Motivasi dan Tujuan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi**

Merger, Konsolidasi dan Akuisisi di Indonesia umumnya dilakukan dalam rangka melakukan efisiensi dan pemeliharaan kesehatan kehidupan suatu kelembagaan badan usaha.

---

<sup>22</sup> Ibid hal. 11

<sup>23</sup> Ibid hal. 12

<sup>24</sup> Ibid hal. 33

Demikian pula halnya dengan Badan-badan Usaha Milik Negara termasuk didalamnya bank.

Perbankan dalam perekonomian memiliki peran yang sangat penting oleh karena itu maka lembaga perbankan perlu mendapat pembinaan, pengawasan yang efektif sehingga lembaga perbankan dapat berfungsi secara efisien, sehat, wajar dan mampu menghadapi persaingan di era global, mampu melindungi secara baik dana nasabah yang dititipkan serta menjalankan dana tersebut kebidang-bidang yang produktif.

Sehubungan dengan itu Bank Indonesia mewajibkan kepada setiap bank untuk menyampaikan ketentuan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha lembaga perbankan.

Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, jika Bank Indonesia memandang bahwa Bank yang bersangkutan akan membahayakan kelangsungan usahanya maka Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan untuk mendorong Bank tersebut melakukan restrukturisasi dalam bentuk merger ataupun konsolidasi.

Jika menyimak Pasal 37 tersebut diatas maka merger ataupun konsolidasi tersebut diatas sebagai penyelamatan bank bermasalah untuk menghindari likuidasi yang akan lebih banyak menimbulkan kerugian dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan serta juga dapat menghambat kegiatan bisnis lainnya.

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/KMK-017/1993 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dibagian pertimbangan Surat Keputusan tersebut dinyatakan bahwa Merger atau Konsolidasi antar Bank dan Akuisisi Bank dapat berlangsung baik dalam rangka mengatasi kesehatan bank maupun perluasan usaha.

Hasil yang diharapkan dari kebijakan, melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi adalah kondisi yang lebih dari yang sebelumnya. Penggabungan dalam bentuk merger atau konsolidasi merupakan strategi memajukan dan mengaktifkan perseroan dalam menjalankan usahanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan atau tanpa likuidasi.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 740/KMK/00/1989 merger atau konsolidasi merupakan tindakan restrukturisasi perseroan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan melalui perubahan status hukum, organisasi dan kepemilikan saham.

Dengan demikian alasan melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan adalah kurang efektifnya perseroan bila bekerja sendiri-sendiri. Untuk itu perlu restrukturisasi perseroan dengan tujuan antara lain perbaikan sistem manajemen perseroan mengurangi atau menghindari persaingan, mencegah terjadinya kepailitan. Restrukturisasi perseroan merupakan pembelian sebagian besar atau seluruh kekayaan atau saham perseroan lain, sehingga perseroan yang bersangkutan bergabung, melebur diri

dengan atau diambilalih perseroan yang lebih kuat. Perseroan yang kuat ini menguasai faktor strategis dalam badan usaha yang dijalankannya.<sup>25</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank didalam penjelasan umum mengatakan bahwa dengan diadakannya perbankan untuk melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi agar supaya tercipta sistem perbankan yang sehat, efisien dan mampu bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas.

Hal tersebut mengingat perbankan memiliki peran yang strategis karena fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam rangka menunjang perekonomian nasional.

Menurut Heru Soepraptono, SH tujuan dilakukannya Merger maka akan diperoleh :

1. Pooling kekuatan/alat untuk meningkatkan skala ekonomi.

Dengan menggabungkan beberapa bank menjadi satu permodalan dan kapasitas bank akan menjadi lebih baik sehingga lebih dapat bersaing.

2. Komplementasi

Dengan menggabungkan beberapa bank dapat diperoleh sinergi karena saling mengisi dan melengkapi sehingga memperkuat posisi management bank dalam persaingan industri perbankan melalui peningkatan kualitas management.

3. Meningkatkan volume usaha bank hasil merger karena merupakan penggabungan aktiva dan pasiva bank hasil merger atau konsolidasi.

---

<sup>25</sup> Muhammad, Abdulkadir. 1996. Hukum Perseroan Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 92

4. Secara cepat bank hasil merger telah menambah tenaga berpengalaman dalam operasional perbankan sehingga mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan usahanya .
5. Dari sisi pemasaran bank hasil merger secara tidak langsung telah memperluas jaringan operasionalnya karena bertambahnya jaringan kantornya yang telah ada sehingga bank mempunyai kesempatan untuk meningkatkan usahanya dengan segera.
6. Dalam kasus tertentu merger dapat mencegah perusahaan dari kebangkrutan dengan cara merger dengan bank yang lebih kuat dan sehat struktur keuangannya.
7. Dari hasil merger akan diperoleh bank yang cukup besar yang diharapkan dapat membantu penyelesaian bank-bank kecil tanpa menggunakan dana Bank Indonesia.
8. Dapat membuka peluang berperan serta di dunia internasional.
9. Memperkecil kompetitor<sup>26</sup>

Munir Fuady mengemukakan beberapa sasaran umum sehingga dilakukannya suatu penggabungan badan usaha perseroan sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan konsentrasi pasar.
- b. Untuk meningkatkan efisiensi.
- c. Untuk mengembangkan inovasi baru.
- d. Sebagai alat investasi.
- e. Sebagai sarana alih teknologi.

---

<sup>26</sup> Heru Soepraptono, 1997. Kebijakan Merger dan Akuisisi di Sektor Perbankan untuk meningkatkan efisiensi Usaha, Seminar Sehari Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara, Jakarta

- f. Mendapatkan akses Internasional.
- g. Untuk meningkatkan daya saing.
- h. Memaksimalkan sumber daya.
- i. Menjamin pasokan bahan baku.<sup>27</sup>

Menurut Ahmad M. Ramli, pada umumnya pelaksanaan Akuisisi adalah sinergi. Sinergi merupakan penggabungan dua faktor yang dapat menghasilkan tenaga yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah tenaga yang dihasilkan apabila masing-masing faktor bekerja sendiri-sendiri.

Umumnya akuisisi lebih menguntungkan karena lebih dapat mengembangkan usaha dan lebih mudah pengelolaannya berkat adanya sumber daya dan peralatan yang berasal dari perusahaan yang diambil alih. Dalam praktek pembuatan akuisisi kurang memperhatikan kepentingan pihak lain seperti karyawan perusahaan terakuisisi, pemegang saham minoritas dan pihak ketiga.<sup>28</sup>

### 3. Penggolongan Merger.

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa jika dua perusahaan melakukan merger, maka salah satu diantaranya harus membubarkan diri dengan cara melakukan likuidasi. Hanya saja berbeda dengan proses likuidasi biasa, likuidasi pada merger ini tidak memerlukan proses pemberesan aset-asetnya mengingat aset-aset tersebut akan beralih menjadi asetnya perusahaan pengambil alih.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Munir Fuady, Hukum Tentang Merger, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 hal. 57

<sup>28</sup> Ahmad M. Ramli, 1995, Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Makalah Seminar Corporate Law, Hotel Horison, Jakarta, hal. 8

<sup>29</sup> Munir Fuady, Hukum Tentang Merger, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 85



Ada beberapa macam penggolongan merger yaitu :

3.1. Penggabungan merger dilihat dari segi jenis usaha.

Dilihat dari segi jenis usaha dari perusahaan yang melakukan merger, maka merger dapat dibagi kedalam empat kategori sebagai berikut :

a. Merger Horizontal.

Merger horizontal merupakan merger diantara dua atau lebih perusahaan dimana semua perusahaan tersebut bergerak pada bidang bisnis yang sama.

Untuk merger horizontal khusus dilakukan jika dalam satu kelompok usaha ada dua perusahaan dalam satu kelompok yang disebut dengan Sister Company. Saham-saham mereka dipegang oleh satu perusahaan Holding, Tetapi kemudian setelah merger horizontal maka perusahaan Holding memegang saham pada perusahaan hasil merger yang telah bersatu. Dalam proses merger horizontal ini, khususnya jika dipilih merger tanpa mengadakan likuidasi, maka tindakan-tindakan yuridis minimal yang harus dilakukan adalah :

- a.1. Semua aktiva dan pasiva dialihkan dari anak perusahaan yang satu ke anak perusahaan yang lain, kecuali jika dipilih merger dengan likuidasi.
- a.2. Anak perusahaan yang satu menghentikan kegiatannya kemudian dibubarkan tanpa likuidasi.

a.3. Pemegang saham minoritas yang tidak setuju merger dapat memilih antara menjadi pemegang saham dalam anak perusahaan atau minta kompensasi harga saham yang sedang dipegangnya tanpa menjadi pemegang saham di anak perusahaan hasil merger.<sup>30</sup>

b. Merger Vertikal.

Merger vertikal adalah suatu gabungan diantara dua perusahaan atau lebih dengan mana yang satu bertindak sebagai supplier bagi yang lainnya. Jadi hubungan bisnis mereka merupakan hubungan produser – supplier atau hubungan dari hulu kehilir.<sup>31</sup>

c. Merger Kon-Generik

Dengan merger Kon-Generik perusahaan-perusahaan yang bergabung saling berhubungan satu sama lain, yang mempunyai kesamaan sifat produksinya, tetapi belum dapat dikatakan sebagai produsen terhadap produk yang sama dan juga bukan hubungan antara produser – supplier.

d. Merger Konglomerat.

Merger konglomerat merupakan gabungan antara dua perusahaan atau lebih yang sama sekali tidak punya keterkaitan bidang usaha satu sama lain.

### 3.2. Klasifikasi merger dilihat dari segi tata cara dilakukannya merger.

---

<sup>30</sup> Ibid, hal.86

<sup>31</sup> Ibid, hal. 89

Dilihat dari segi tata cara bagaimana merger dilakukan, maka merger dapat diklasifikasikan sebagai berikut<sup>32</sup> :

a. Merger dengan likuidasi dan jual beli aset.

Dalam hal ini terlebih dahulu perusahaan target dilikuidasi, baru kemudian aset-asetnya yang masih tertinggal dibagi-bagikan kepada pemegang saham menurut porsinya masing-masing. Selanjutnya secara individual pemegang saham tersebut menjual aset itu kepada perusahaan merger yang akan membelinya.

b. Merger dengan jual beli aset dan likuidasi

Dengan metode ini justru jual beli aset perusahaan target yang terlebih dahulu dilakukan. Selanjutnya baru dilakukan likuidasi terhadap perusahaan target tersebut.

c. Merger dengan jual beli saham dan likuidasi.

Dapat juga yang dibeli semua saham perusahaan target dari masing-masing individual pemegang saham. Setelah itu perusahaan target dilikuidasi dan asetnya dialihkan kepada perusahaan pembeli.

#### **4. Keterlibatan pihak-pihak dalam Merger, Konsolidasi dan Akuisisi**

Dalam pelaksanaan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi terdapat berbagai pihak yang terlibat dan yang berkepentingan antara lain karyawan, nasabah, notaris, akuntan, appraisal, konsultan hukum, konsultan pajak, konsultan manajemen, konsultan keuangan.

---

<sup>32</sup> Ibid, hal. 89-70

Kepentingan nasabah dan kepentingan karyawan harus diperhatikan sebelum dilaksanakan merger, konsolidasi dan akuisisi karena mereka terkait langsung dan ada kemungkinan pihak-pihak ini dapat dirugikan dalam proses pelaksanaan merger, konsolidasi dan akuisisi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas bahwa perbuatan hukum penggabungan, peleburan dan pengambil alihan harus memperhatikan kepentingan perseroan, karyawan dan masyarakat.

a. Keterlibatan Karyawan

Pada pelaksanaan merger, konsolidasi dan akuisisi ada kemungkinan mengakibatkan kerugian pada karyawan, karena hal ini dapat terjadi bila karyawan dari perusahaan yang dilikuidasi atau yang akan digabungkan tidak dipakai oleh Badan usaha yang dipertahankan atau badan usaha yang baru didirikan sebagai bank hasil merger, konsolidasi atau akuisisi.

Untuk menghindari kemungkinan yang mengakibatkan kerugian pada karyawan maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas memberikan perlindungan kepada karyawan bahwa didalam pelaksanaan merger, konsolidasi dan akuisisi harus memperhatikan kepentingan karyawan.

b. Keterlibatan Nasabah

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa tindakan merger, konsolidasi dan akuisisi yang dilakukan oleh Perbankan tidak boleh merugikan kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak tertentu dan sekaligus

merupakan upaya untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah.

Bank adalah suatu lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya pada bank tersebut, oleh karena itu Bank harus memberikan suatu pelayanan yang baik dan memberikan perlindungan kepada para nasabahnya sehingga tindakan merger, konsolidasi dan akuisisi yang akan dilakukan oleh bank tersebut tidak akan merugikan nasabah.

Bank dalam pelaksanaan merger, konsolidasi dan akuisisi dapat memberikan suatu perlindungan berupa penjelasan-penjelasan mengenai akibat yang timbul yang berkaitan dengan nasabah sehingga nasabah tidak menjadi resah jika harus berhubungan dengan bank pada waktu akan atau setelah mengadakan merger, konsolidasi dan akuisisi.

Hal tersebut sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan konsekwensi logis terhadap pelayanan jasa perbankan sehingga para pelaku usaha jasa perbankan dituntut untuk:

- b.1. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya.
- b.2. Melayani nasabah secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

c. Keterlibatan Notaris

Dalam pelaksanaan proses merger, konsolidasi dan akuisisi keterlibatan seorang notaris adalah sebagai berikut:

c.1. Pembuatan Akta Notaris untuk perubahan Anggaran Dasar karena setiap merger, konsolidasi atau akuisisi dapat dipastikan akan mengakibatkan terjadinya perubahan atas ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar baru, terutama berkenaan dengan struktur dan susunan organisasinya. Perubahan ini wajib dilakukan dengan akta otentik untuk selanjutnya dimintakan pengesahan Menteri Kehakiman.

c.2. Pembuatan akta notaris untuk pembubaran perusahaan merupakan salah satu ciri utama merger dan konsolidasi. Keputusan pembubaran perusahaan perseroan wajib dituangkan dalam bentuk akta otentik.

c.3. Pembuatan akta notaris untuk perjanjian merger, konsolidasi dan akuisisi.

d. Keterlibatan Akuntan Publik

Sebelum pelaksanaan merger, konsolidasi dan akuisisi keterlibatan akuntan publik yakni memeriksa dan meneliti keuangan dari masing-masing perusahaan perseroan yang terlibat serta kemudian menyusun dalam bentuk laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi sampai dengan saat terjadinya merger, konsolidasi dan akuisisi. Hasil audit tersebut yang dituangkan dalam bentuk neraca dan laporan laba rugi memperlihatkan posisi nilai buku dan nilai pasar dari aktiva maupun pasiva masing-masing perusahaan perseroan yang akan melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi.

Setelah merger, konsolidasi dan akuisisi akuntan publik akan menyusun rencana dan prospek laba rugi perusahaan perseroan hasil merger,

konsolidasi atau akuisisi sebagai bahan pertimbangan bagi instansi terkait dalam memberikan persetujuannya.

e. Keterlibatan Appraisal

Jasa appraisal diperlukan guna menetapkan nilai wajar pasar atas harta perusahaan perseroan yang digabungkan secara wajar, terbuka dan obyektif. Harga pasar harta perusahaan yang digabungkan sangat penting untuk digunakan sebagai dasar perhitungan harta kekayaan para pihak

f. Keterlibatan Konsultan

Setelah dilaksanakannya merger, konsolidasi dan akuisisi diharapkan tidak mengakibatkan menurunnya kinerja maupun tingkat kesehatan perusahaan perseroan.

Oleh karena itu diperlukan peran dan jasa konsultan yang akan membantu agar pelaksanaan dapat dilakukan dengan lancar sesuai tujuan yang diharapkan. Para konsultan pada dasarnya bertugas untuk memberikan pendapat-pendapat serta saran-saran yang berhubungan dengan proses dan pelaksanaan merger, konsolidasi atau akuisisi.

Konsultan-konsultan tersebut antara lain:

f.1. Konsultan Hukum

Konsultan hukum bertugas untuk memberikan legal opinion dan legal advice kepada perusahaan yang terlibat merger, konsolidasi atau akuisisi.

Dengan adanya legal opinion dan legal advice diharapkan dapat dihindari perumusan perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### f.2. Konsultan Management

Konsultan Management bertugas memberikan saran-saran dan nasehat-nasehat berdasarkan prinsip-prinsip management dan trend bisnis kepada para pihak dan di dalam menyusun struktur management baru agar tercapai efisiensi yang maksimal.

#### f.3. Konsultan Keuangan

Konsultan keuangan memberikan nasehat-nasehat dan saran-saran tentang cara pembiayaan.

Berdasarkan saran-saran tersebut para pihak dapat mempertimbangkan untuk memilih bentuk kompensasi bagi masing-masing pihak apakah dalam bentuk tunai atau dalam bentuk pemebrian saham pada pihak yang bergabung.

#### f.4. Konsultan Pajak

Konsultan pajak akan bertugas meneliti sampai sejauh mana kewajiban pembayaran pajak perusahaan telah dilakukan.

Adanya penelitian yang dilakukan oleh konsultan pajak tersebut sangat bermanfaat bagi perusahaan hasil penyatuan guna menghindari kerugian yang tidak diinginkan.

Disamping itu konsultan pajak juga berperan dalam memberikan saran dan nasehat pada para pihak mengenai pelaksanaan merger,



konsolidasi atau akuisisi pada aspek perpajakan agar memberikan hasil yang optimal.

#### **D. AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA**

Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dari segi hukum perusahaan disamping mempunyai pengertian, perbedaan tersendiri juga dalam pelaksanaannya akan memberikan akibat hukum yang berbeda sebagai berikut :

##### **1. Akibat hukum merger dan konsolidasi**

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 107 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas bahwa dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan maka perseroan yang menggabungkan diri atau meleburkan diri menjadi bubar.

Merger merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Oleh karena itu merger mengakibatkan beralihnya secara hukum segala hak-hak dan kewajiban terhadap pihak III dan pemegang saham perseroan, ini berarti pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri secara hukum menjadi pemegang saham perseroan hasil merger.

Konsolidasi merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar.

Oleh karena itu konsolidasi mengakibatkan segala hak dan kewajiban yang dimiliki oleh dua atau lebih perseroan yang meleburkan diri masuk kedalam perseroan baru dan beralih pula hak dan kewajiban perseroan terhadap Pihak III dan pemegang saham kedalam Perseroan baru.

Disamping hal tersebut diatas akibat hukum pelaksanaan merger dan konsolidasi mengakibatkan pula :

- a. Bagi merger perlu dilakukan perbuatan perubahan anggaran dasar dan dimintakan persetujuan Menteri Kehakiman apabila perubahan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Bagi Konsolidasi perlu dilakukan perbuatan pembuatan Akta Pendirian Perseroan hasil konsolidasi dan dimintakan pengesahan Menteri Kehakiman.

Terhadap bubarnya Perseroan akibat terjadinya merger dan konsolidasi sesuai Pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dapat dilakukan dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi.

Selanjutnya apabila pembubaran perseroan tidak dilakukan dengan likuidasi maka sesuai Pasal 107 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 berakibat :

- aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri beralih secara hukum pada perseroan hasil penggabungan atau peleburan; dan

- pemegang saham perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri jadi pemegang saham perseroan hasil penggabungan atau peleburan

Bila pembubaran Perseroan akibat penggabungan dan konsolidasi dilakukan dengan likuidasi terlebih dahulu, maka ketentuan likuidasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 berlaku pula terhadap pembubaran perseroan tersebut. Perseroan bubar menurut Pasal 114 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dikarenakan :

- a. Keputusan Rapat para Pemegang Saham
- b. Jangka waktu berdiri yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir
- c. Penetapan pengadilan

Dalam hal pembubaran perseroan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham maka direksi selaku pengurus dan organ perseroan yang mengetahui seluk beluk perseroan mempunyai hak untuk mengajukan usul pembubaran perseroan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham kemudian yang berwenang memutuskan mengenai pembubaran tersebut.

Untuk sahnya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, maka keputusan harus diambil berdasarkan ketentuan dalam Pasal 74 ayat 1 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yaitu :

- a. Berdasarkan musyawarah untuk mufakat ( Pasal 74 ayat 1 )
- b. Dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran Perseroan, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sah

apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  ( tiga perempat ) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  ( tiga perempat ) bagian dari jumlah suara tersebut ( Pasal 76 )<sup>33</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka bubarnya Perseroan karena Rapat Umum Pemegang Saham pada saat ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ( Pasal 115 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ) dan pembubaran sebagaimana tersebut diikuti dengan likuidasi oleh likuidator ( Pasal 115 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ) sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya pembubaran terjadi terlebih dahulu baru kemudian disusul dengan likuidasi

## **2. Akibat Hukum Akuisisi**

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 103 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas bahwa akuisisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan melalui akuisisi seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut.

Oleh karena itu akuisisi merupakan pengalihan kepemilikan perseroan yang menimbulkan perubahan dan akibat hukum yang berbeda terhadap perseroan pengakuisisi dan perseroan terakuisisi.

Proses akuisisi hanya mengubah status pemilik saham yaitu beralih dari pemegang saham perseroan terakuisisi kepada pemegang saham pengakuisisi.

---

<sup>33</sup> I.G. Rai Widjaya SH,MA, 2000, Hukum Perusahaan. Kesaint Blance. Jakarta. Halaman 377

Jadi pada akuisisi perubahan yang timbul pada pemegang saham perseroan pengakuisisi dan pemegang saham perseroan terakuisisi bukan pada status perseroan. Perseroan terakuisisi tetap ada dan menjalankan kegiatan Perseroan secara sebagaimana mestinya. Disamping itu adanya akuisisi mengakibatkan pula beralihnya pengendalian perseroan yang terakuisisi kepada perusahaan pengakuisisi.

#### **E. PERANAN BANK INDONESIA SEBAGAI PEMBINA DAN PENGAWAS PERBANKAN**

Bank Indonesia dalam menggemban tugas untuk mengatur dan mengawasi bank sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, berwenang untuk menetapkan Peraturan-peraturan, memberikan dan mencabut ijin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan memberikan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mengacu pada ketentuan tersebut maka sangat jelas bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban secara utuh untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya baik yang bersifat preventif maupun represif.<sup>34</sup>

Dalam hal pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-

---

<sup>34</sup> Muhammda Djumhana, 2000. Hukum Perbankan di Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung halaman : 104

Undang perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Mengingat bank terutama bekerja dengan atas dasar kepercayaan maka setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya.. Sejalan dengan itu Bank Indonesia diberi wewenang dan kewajiban untuk membina serta melakukan pengawasan terhadap bank.

Tindakan Bank Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bank membawa akibat terhadap bank-bank yang diawasi yaitu bank yang diawasi mempunyai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai berikut :

a. Pasal 29 ayat 2 dan ayat 3

Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa bank wajib menjaga tingkat kesehatan dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

b. Pasal 30 ayat 1 dan ayat 2

Didalam pasal tersebut dinyatakan bahwa :

- Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Atas permintaan Bank Indonesia, bank wajib memberi kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh

kebenaran dari segala keterangan, dokumen, penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

c. Pasal 34

Didalam pasal tersebut dinyatakan bahwa bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang sebelumnya wajib diaudit oleh akuntan publik terlebih dahulu serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan Bank Indonesia.

Didalam pelaksanaan merger dan atau konsolidasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 merupakan salah satu bentuk tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia. Merger dan atau konsolidasi yang dilaksanakan oleh suatu bank merupakan suatu hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Tindakan-tindakan tersebut diatas merupakan urutan yang ditentukan oleh Bank Indonesia dengan melihat kondisi bank yang bersangkutan. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi :

Pasal 37

(1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :

- a. Pemegang Saham menambah modal.
- b. Pemegang Saham mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi Bank.

- c. Bank menghapus bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan mempertimbangkan kerugian bank dengan modalnya.
- d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain.
- e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya.
- f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain.
- g. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

(2) Apabila :

- a. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, dan atau
- b. Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistim Perbankan, pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut ijin usaha bank dan memerintahkan Direksi Bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.

(3) Dalam hal Direksi Bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan keputusan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



Pasal tersebut diatas menjelaskan bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank, Bank Indonesia melakukan tindakan preventif untuk mengembalikan kondisi bank.

Bila melihat urutan pengambilan tindakan oleh Bank Indonesia maka pelaksanaan merger dilakukan setelah menjalankan urutan nomor (1) a, b, c, maksudnya adalah bahwa sebelum dilakukan merger atau konsolidasi Bank Indonesia memerintahkan kepada Direksi Bank yang bersangkutan untuk membenahi kondisi internal. Hal-hal yang menyebabkan kondisi bank tersebut tidak sehat harus dibenahi dengan penambah modal atau mengganti direksi. Bila hal tersebut ternyata tidak mengalami perubahan maka Bank Indonesia memutuskan bank yang bersangkutan untuk melakukan merger dengan bank lain atau melakukan konsolidasi.

Disamping hal-hal tersebut diatas didalam pelaksanaan merger dan konsolidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum Pasal 3 dan Pasal 4 mengatakan bahwa :

(1) Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dapat dilakukan atas :

- a. Inisiatif bank yang bersangkutan.
- b. Permintaan Bank Indonesia ; atau
- c. Inisiatif Badan Khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.

(2) Merger, Konsolidasi dan Akuisisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf

a dan c, wajib terlebih dahulu memperoleh ijin dari Direksi Bank Indonesia.

Pasal tersebut diatas menjelaskan bahwa peran Bank Indonesia dalam pelaksanaan merger atau konsolidasi dapat berperan secara aktif dan pasif. Berperan aktif apabila menurut pertimbangan Bank Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 suatu bank diperkirakan mengalami kesulitan yang bisa membahayakan kelangsungan usahanya dan Bank Indonesia dapat melaksanakan suatu upaya paksa atas inisiatif sendiri agar bank yang bermasalah tersebut melaksanakan merger atau berkonsolidasi.

Sebaliknya Bank Indonesia dapat berperan pasif apabila inisiatif merger atau konsolidasi datang dari bank yang bersangkutan.

Disini peran Bank Indonesia hanya sebagai perantara yang menjembatani antara bank-bank yang akan bergabung dan juga Bank Indonesia dapat memberikan pertimbangan usulan untuk memilihkan mitra bank untuk bergabung yang sifatnya tidak mengikat bank yang akan bergabung.

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip – prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati – hati, tekun dan tuntas terhadap gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip – prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>35</sup>

Metode penelitian yang dipergunakan dalam setiap cabang ilmu pengetahuan selalu disesuaikan dengan disiplin atau cabang ilmu pengetahuan yang akan diteliti. Oleh karena itu penerapan metode penelitian hukum akan berbeda dengan metode penelitian bidang ilmu – ilmu lainnya.

Dalam metodologi penelitian ilmu hukum yang merupakan bidang kajian dalam penulisan tesis ini, diuraikan mengenai penalaran, dalil – dalil, postulat – postulat dan proposisi – proposisi yang menjadi latar belakang dan setiap langkah dalam proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif – alternatif tersebut serta membandingkan unsur – unsur penting dalam rangkaian penelitian hukum.<sup>36</sup>

Penelitian hukum dengan hanya mempergunakan metode normatif saja mempunyai kemampuan dan jangkauan terbatas.<sup>37</sup>

Dalam penelitian hukum normatif biasanya hanya dipergunakan sumber – sumber data sekunder saja, yaitu peraturan – peraturan perundang – undangan,

---

<sup>35</sup> Soarjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, Hal. 6

<sup>36</sup> Rony Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hal. 9

<sup>37</sup> Ibid, Hal. 9

keputusan – keputusan pengadilan, teori – teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

Dengan bantuan ilmu – ilmu sosial, penelitian hukum diperkaya dengan kemungkinan dipergunakannya semua metode dan teknik yang lazim dipergunakan dalam penelitian ilmu – ilmu sosial.

Penelitian hukum dengan mempergunakan metode dan teknik yang lazim digunakan dalam penelitian ilmu – ilmu sosial disebut hukum yang sosiologis atau sosio-legal research.<sup>38</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis Empiris. Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau secara hukum. Empiris berasal dari Bahasa Inggris, Empirical artinya bersifat nyata.

Maka pendekatan empiris dimaksudkan ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat.

Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini yang digunakan adalah metode kualitatif, metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan antara lain ; pertama, menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan; kedua, metode ini menyajikan secara langsung akibat hubungan antara peneliti dengan responden ; ketiga, metode

---

<sup>38</sup> Ibid, Hal, 9

ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi<sup>39</sup>.

Menurut Hukum Hadi Kusuma pembuktian dengan pendekatan empiris selalu diarahkan kepada identifikasi ( pengenalan ) terhadap hukum nyata berlaku, yang implisit berlaku ( sepenuhnya ) bukan yang eksplisit ( jelas, tegas) diatur didalam Perundang-undangan atau yang diuraikan dalam kepustakaan. Begutu pula diarahkan kepada efektifitas ( kemajuan, kemapanan ) hukum itu dalam kehidupan masyarakat<sup>40</sup>.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang jhendak dicapai pada penelitian ini nantinya akan bersifat diskriptif analistis yaitu untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia , keadaan atau gejala-gejala lain.<sup>41</sup>

Disini disini akan menggambarkan penyatuan atau ketentuan pelaksanaan proses penyatuan Bank yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

## **3. Sumber Data**

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, data primer dan data sekunder.

- a. Data primer berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan. Dan hal tersebut diperoleh melalui wawancara dan pengamatan di lapangan.

<sup>39</sup> Remy J. Malaiong, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rusda Karya, Bandung 1995, Hal : 5

<sup>40</sup> Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung 1995, Hal : 62

<sup>41</sup> Soerjono, Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, Hal : 1

Wawancara dilakukan di Kantor Pusat PT. Bank Mandiri ( Persero ) di Jakarta yakni dengan pejabat – pejabat Devisi Legal, mengingat bahwa pejabat-pejabat dimaksud dahulunya berasal dari Devisi Legal masing-masing Bank BUMN yang ikut terlibat dalam suatu team untuk menangani proses penyatuan keempat Bank BUMN menjadi PT. Bank Mandiri ( Persero ).

b. Data sekunder, yaitu data diperoleh untuk melengkapi data primer.

Adapun data sekunder terdiri dari :

b.1. Bahan hukum primer yang merupakan bahan – bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu :

b.1.1. Undang-Undang Dasar 1945,

b.1.2. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata,

b.1.3. Kitab Undang – Undang Hukum Dagang,

b.1.4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,

b.1.5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

b.1.6. Peraturan Perundang – undangan lainnya yang mempunyai kaitan dengan permasalahan penelitian.

b.2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan – bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, terdiri dari :

b.2.1. Buku – buku hasil karya sarjana,

b.2.2. Makalah / majalah,

b.3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan – bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder, yakni :

b.3.1. Kamus hukum,

b.3.2. Kamus lainnya yang menyangkut penelitian.

#### **4. Teknik Penentuan Sampel**

Sampel atau sample adalah contoh monster, representant atau wakil dari suatu populasi yang cukup besar jumlahnya. Sedang sampling adalah aktivitas mengumpulkan sample. Tujuan penelitian mengambil sample ialah memperoleh keterangan mengenai obyeknya dengan jalan mengamati sebagian saja dari populasi.<sup>42</sup>

Mengingat bahwa obyek dari penelitian ini hanya di Kantor Pusat Bank Mandiri ( Persero ) Jakarta yakni di Devisi Legal maka tidak perlu dilakukan penentuan sampel karena pejabat-pejabat dari Devisi Legal pada waktu proses penyatuan ke empat Bank BUMN sebagian besar ikut terlibat dalam proses penyatuan tersebut.

Sedangkan responden dalam penelitian adalah :

- a. Bapak Mohammad Isa, SH, LLM – Kepala Devisi Legal PT. Bank Mandiri ( Persero )
- b. Bapak I Nyoman Samkara, SH – Policy dan Legal Products Department Legal Group.
- c. Para staf di Devisi Legal yang ikut terlibat dalam proses penyatuan ke empat Bank BUMN.

---

<sup>42</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 43

## **5. Analisa Data**

Analisa Data yang digunakan adalah analisa diskriptif analisis, yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang ada dan dipakai, sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti.

Disamping itu digunakan juga metode analisa yang kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan diteliti kembali dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. LATAR BELAKANG DAN PERTIMBANGAN PENYATUAN KE EMPAT BANK BUMN**

Latar belakang dan motivasi setiap bank melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi berbeda-beda, demikian juga halnya dengan ke empat bank BUMN juga berbeda dengan bank-bank pada umumnya.

Meskipun sama-sama melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi akan tetapi belum tentu memiliki kesamaan latar belakang dan permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil penelitian, latar belakang pemerintah mengeluarkan penyatuan keempat bank BUMN ke dalam PT. Bank Mandiri ( Persero ) dikarenakan :

- a. Kinerja ke empat bank BUMN yang sangat rapuh serta banyaknya kredit macet yang mencapai 92% dari total kredit yang disalurkan kepada debiturnya dan tergolong kredit yang tidak mampu membayar hutang pokok dan bunga.<sup>43</sup>
- b. Krisis ekonomi regional yang juga melanda Indonesia menyebabkan perlunya pembenahan sektor perbankan di Indonesia sehingga pemerintah dengan bantuan Internasional Monetary Fund ( IMF ), Bank Dunia dan Asian Development Bank ( ADB ) telah menetapkan kebijakan dan program rekapitulasi bank swasta maupun Pemerintah.

---

<sup>43</sup> Media Indonesia, Selasa, tanggal 8 Desember 1998

Untuk itu maka pada akhir bulan Pebruari 1998 Pemerintah telah mengumumkan rencana untuk melakukan restrukturisasi ke empat bank BUMN sebagai bagian dari kebijakan dari rencana pemerintah untuk melakukan restrukturisasi dan rekapitalisasi sektor perbankan Indonesia. .

Sehubungan dengan hal tersebut maka didirikanlah PT. Bank Mandiri ( Persero ) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998 yang akan menerima penyatuan dari ke empat bank BUMN yang selanjutnya diharapkan akan menjadi pilar perbankan Indonesia.

Sebagai bagian dari proses penyatuan ke empat bank BUMN ke dalam PT. Bank Mandiri ( Persero ) terlebih dahulu dilakukan restrukturisasi terhadap ke empat bank BUMN yang selanjutnya bersamaan dengan proses restrukturisasi dan penyatuan ke empat bank BUMN secara hukum akan dilakukan kapitalisasi PT. Bank Mandiri ( Persero ).

Dengan dilakukannya penyatuan ke empat bank BUMN ke dalam PT. Bank Mandiri ( Persero ) yang didahului dengan restrukturisasi, akan menjadikan PT. Bank Mandiri ( Persero ) sebagai bank yang kokoh dan berdaya saing tinggi.

Judul : Profil Neraca Singkat Masing-Masing Bank BUMN per  
31-12-1998

( dalam milyar rupiah )

BANK	ASET	KEWAJIBAN	EKUITAS
BBD	24.639	53.595	( 28.956 )
BDN	32.051	60.546	( 28.445 )
BEII	31.709	58.754	( 27.045 )
BAPINDO	13.335	22.393	( 9.058 )

Sumber : Hasil wawancara dengan Kepala Divisi Legal PT. Bank Mandiri  
( Bapak Mohamad Isa, SH, LLM ) dan beliau mengambil dari  
Rancangan Merger PT. Bank Mandiri ( Persero )

Dengan keadaan keuangan seperti tersebut diatas dimana masing-masing Bank BUMN ekuitasnya menunjukkan posisi negatif, maka perlu diadakan restrukturisasi secara menyeluruh baik berupa perbaikan kualitas aktiva produktif maupun peningkatan efisiensi antara lain melalui pembenahan organisasi sistem dan sumber daya manusia dari masing-masing Bank BUMN sehingga nantinya PT. Bank Mandiri ( Persero ) akan mempunyai organisasi dan sistem yang lebih efisien serta sumber daya manusia yang profesional dan produktif.

## **B. PERSYARATAN DAN PROSEDUR MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI**

Merger atau penggabungan dan konsolidasi atau peleburan perseroan di bidang perbankan dan perseroan pada umumnya terdapat perbedaan dalam hal

pemberian ijin<sup>44</sup>.

Pada perseroan di bidang perbankan sesuai ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan wajib terlebih dahulu mendapat ijin Pimpinan Bank Indonesia, sedangkan pada perseroan pada umumnya merger, konsolidasi dan akuisisi sesuai Pasal 76 UUPT harus mendapat ijin / keputusan RUPS dan keputusan RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  ( tiga per empat ) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  ( tiga per empat ) bagian jumlah suara.

Alasan perbedaan ini dapat dimaklumi, pada perseroan bidang perbankan menyangkut kepentingan masyarakat banyak karena usaha perbankan menghimpun dana dari masyarakat. Pada perseroan umum hanya menyangkut kepentingan pemegang saham<sup>45</sup>.

Persyaratan dan tata cara merger dan konsolidasi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut :

- a. direksi dari semua perseroan yang akan menggabungkan diri atau meleburkan diri bersama-sama membuat rencana penggabungan atau peleburan. Dalam Pasal 102 ayat 2 UUPT dinyatakan bahwa rencana penggabungan atau peleburan dituangkan dalam rancangan penggabungan dan peleburan yang memuat tentang :

---

<sup>44</sup> Muhammad Abdul Kadir, Hukum Perseroan Terbatas, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 88

<sup>45</sup> Ibid, hal. 88

- a.1. Nama-nama perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan
- a.2. Alasan serta penjelasan masing-masing direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan dan persyaratan penggabungan atau peleburan.
- a.3. Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan terhadap saham perseroan hasil penggabungan atau peleburan
- a.4. Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil penggabungan atau peleburan.
- a.5. Neraca perhitungan laba rugi yang meliputi 3 tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan menggabung atau melebur.
- b. Direksi wajib mengumumkan dalam dua surat kabar harian mengenai rencana merger atau konsolidasi dalam waktu paling lambat 14 hari sebelum panggilan RUPS ( Pasal 105 ayat 2 UUPT )
- c. Rancangan merger atau konsolidasi masing-masing perseroan diajukan pada RUPS masing-masing untuk dimintai persetujuannya ( Pasal 102 ayat 3 UUPT )
- d. Rancangan merger atau konsolidasi perseroan yang telah disetujui oleh RUPS dilampirkan pada permohonan perubahan anggaran dasarnya atau pengesahan akta pendirian perseroan hasil merger atau konsolidasi oleh Menteri Kehakiman ( Pasal 106 ayat 3 UUPT ). Persetujuan dan penolakan Menteri Kehakiman akan diberikan dalam waktu paling lambat 60 hari

setelah permohonan diterima ( Pasal 9 ayat 2 UUPT ). Dalam hal permohonan ditolak maka penolakan diberitahukan secara tertulis dengan memberikan akta penolakannya ( Pasal 9 ayat 3 UUPT ).

- e. Direksi wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah persetujuan atau pengesahan ( Pasal 106 dan Pasal 21 UUPT )
- f. Direksi mengumumkan merger dan konsolidasi tersebut dalam tambahan Berita Negara dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak pendaftaran ( Pasal 106 ayat 5 dan Pasal 22 UUPT ).
- g. Direksi perseroan hasil merger atau konsolidasi wajib mengumumkan hasil merger atau konsolidasi tersebut dalam dua surat kabar harian dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak merger atau konsolidasi dilakukan ( Pasal 108 ayat 1 UUPT )

Berdasarkan Pasal 103 UUPT akuisisi dapat dilakukan oleh badan hukum atau perseroan sebagai pihak yang mengambil alih, sedangkan pihak yang diambil alih adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas. Pasal 103 UUPT mengatur pula persyaratan dan prosedur akuisisi oleh perseroan atau badan hukum lain atau perseorangan sebagai berikut :

- a. Rencana akuisisi yang dituangkan dalam rancangan akuisisi

Pasal 103 ayat 3 UUPT menyatakan bahwa dalam hal akuisisi dilakukan oleh perseroan maka berlaku ketentuan bahwa rancangan akuisisi yang disusun oleh Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan yang akan diambil alih yang memuat sekurang-kurangnya :

- a.1. Nama perseroan pengakuisisi dan yang diakuisisi
- a.2. Alasan serta penjelasan direksi masing-masing persero tentang persyaratan serta tata cara akuisisi saham yang diambil alih.

b. Pasal 103 ayat 4 UUPT

Pasal ini menyatakan bahwa dalam hal akuisisi dilakukan oleh badan hukum yang bukan perseroan ( misal koperasi ) maka berlaku ketentuan yaitu bahwa rencana akuisisi dituangkan dalam rancangan akuisisi yang disusun oleh Direksi Perseroan yang diakuisisi dan badan pengurus badan hukum yang bukan perseroan yang akan mengambilalih yang memuat sekurang-kurangnya :

- b.1. Nama perseroan yang akan diakuisisi dan nama badan hukum yang bukan perseroan yang akan mengakuisisi.
- b.2. Alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan diakuisisi dan badan hukum yang bukan perseroan yang akan mengakuisisi mengenai prayaratan serta tata cara akuisisi saham perseroan yang akan diakuisisi.

c. Pasal 103 ayat 5 UUPT

Pasal ini menyatakan bahwa dalam hal akuisisi yang dilakukan oleh perseorangan maka ketentuan yang berlaku yaitu bahwa rencana akuisisi dituangkan dalam rancangan akuisisi yang disusun oleh Direksi Perseroan yang akan diakuisisi atau oleh orang perorang yang akan mengakuisisi yang sekurang-kurangnya memuat :

- c.1. Nama perseroan yang akan diakuisisi dan nama perseorangan yang akan mengakuisisi
- c.2. Alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan diakuisisi tentang persyaratan serta tata cara akuisisi saham.
- d. Akuisisi dilakukan dengan persetujuan RUPS masing-masing atas rancangan akuisisi yang diajukan oleh direksi masing-masing perseroan. Keputusan RUPS sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUPT dan Pasal 76 UUPT.
- e. Rancangan Akuisisi perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS dilaporkan kepada Menteri Kehakiman.
- f. Direksi Perseroan yang mengambilalih wajib mendaftarkan perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal penerimaan laporan kepada Menteri Kehakiman.
- g. Perseroan yang telah didaftarkan kemudian diumumkan dalam tambahan Berita Negara dalam waktu paling lambat 30 hari sejak pendaftaran dalam daftar perusahaan.
- h. Direksi perseroan yang melakukan akuisisi wajib mengumumkan dalam dua surat kabar harian dalam waktu paling lambat 30 hari setelah akuisisi yaitu sejak tanggal penerimaan laporan oleh Menteri Kehakiman.

Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Akuisisi Perseroan Terbatas sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat Merger, Konsolidasi dan Akuisisi



1. Hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan
    - 1.1. Kepentingan Perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan yang bersangkutan
    - 1.2. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha
  2. Tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.
  3. Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
  4. Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam angka 3 diatas tidak menghentikan proses pelaksanaan merger, konsolidasi dan akuisisi.
  5. Harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham.
  6. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  bagian dari jumlah suara tersebut.
- b. Tata Cara Merger dan Konsolidasi
1. Direksi dari perseroan yang akan menggabungkan diri atau meleburkan diri dan menerima penggabungan atau peleburan masing-masing menyusun usulan rancangan penggabungan atau peleburan

2. Usulan rancangan tersebut wajib mendapat persetujuan Komisaris dan sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Nama dan tempat kedudukan perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan
  - b. Alasan serta penjelasan masing-masing Direksi Perseroan yang akan melakukan atau peleburan dan persyaratan penggabungan atau peleburan.
  - c. Tata Cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan terhadap saham perseroan hasil penggabungan atau peleburan.
  - d. Rancangan perubahan Anggaran Dasar Perseroan hasil penggabungan atau peleburan.
  - e. Neraca perhitungan laba-rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan .
  - f. Hal-hal yang perlu diketahui oleh Pemegang saham masing-masing perseroan, antara lain:
    - f.1. Neraca Performa perseroan hasil penggabungan atau peleburan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan perseroan yang dapat diperoleh dari penggabungan atau peleburan berdasarkan penilaian ahli yang independen.

- f.2. Cara penyelesaian status karyawan perseroan yang akan menggabungkan atau meleburkan diri.
  - f.3. Cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga
  - f.4. Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan atau peleburan perseroan.
  - f.5. Susunan, gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Komisaris perseroan hasil penggabungan atau peleburan.
  - f.6. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan atau peleburan
  - f.7. Laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai.
  - f.8. Kegiatan utama perseroan dan perubahan nama tahun buku yang sedang berjalan.
  - f.9. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perseroan.
  - f.10. Nama anggota Direksi dan Komisaris
  - f.11. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.
3. Direksi wajib mengumumkan ringkasan atas rancangan penggabungan atau peleburan dalam 2 (dua) surat kabar harian serta diumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Rancangan penggabungan atau peleburan berikut konsep akta penggabungan atau peleburan diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham guna dimintakan persetujuannya.
5. Konsep akta penggabungan atau peleburan yang telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dituangkan dalam Akta penggabungan atau peleburan yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris dalam Bahasa Indonesia.

#### Untuk Penggabungan

6. Dalam hal penggabungan perseroan dilakukan dengan mengadakan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maka Direksi Perseroan yang akan menerima penggabungan tersebut wajib mengajukan permohonan persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Kehakiman secara tertulis dengan melampirkan akta perubahan anggaran dasar beserta akta penggabungan dan mendaftarkan dalam daftar perusahaan serta mengumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman  
  
Persetujuan tersebut diberikan dalam waktu paling lama 60 hari setelah permohonan diterima.
7. Dalam hal permohonan ditolak maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon disertai alasan penolakannya dalam jangka waktu 60 hari setelah permohonan diterima.

8. Dalam hal penggabungan perseroan dilakukan dengan disertai perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman, maka Direksi Perseroan yang akan menerima penggabungan wajib melaporkan akta penggabungan perseroan dan kata perubahan anggaran dasar tersebut kepada Menteri Kehakiman dan mendaftarkan dalam daftar perusahaan serta mengumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

9. Direksi Perseroan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan

#### Untuk Peleburan

10. Direksi Perseroan yang meleburkan diri wajib mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian perseroan hasil peleburan dengan melampirkan akta peleburan kepada Menteri Kehakiman secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan mendaftarkan dalam daftar perusahaan serta mengumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia setelah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman paling lama 60 hari setelah permohonan diterima.

11. Dalam hal permohonan ditolak maka penolakan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah permohonannya diterima.

12. Tentang Penggabungan dan peleburan Direksi hasil penggabungan atau peleburan wajib mengumumkan hasil penggabungan dan peleburan

tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 hari terhitung sejak penggabungan atau peleburan dilakukan.

c. Tata Cara Akuisisi (Pengambil alihan)

Sesuai ketentuan Pasal 103 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa pengambil alihan perseroan dapat dilakukan oleh Badan Hukum atau orang-perorangan dan pengambil alihan tersebut dapat dilakukan melalui pengambil alihan seluruh atau sebagian besar saham sehingga beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

Mengenai Tata Cara pengambil alihan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, Peleburan dan Pengambil alihan Perseroan Terbatas mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksud untuk melakukan pengambil alihan kepada Direksi perseroan yang akan diambil alih.
2. Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambil alih masing-masing menyusun usulan rencana pengambil alihan.
3. Usulan tersebut harus mendapat persetujuan Komisaris Perseroan yang akan diambil alih dan yang mengambil alih dengan memuat sekurang-kurangnya :
  - 3.1. Nama dan tempat kedudukan perseroan serta badan hukum lain atau identitas orang perorangan yang melakukan pengambil alihan.

- 3.2. Alasan serta penjelasan masing-masing Direksi Perseroan, pengurus badan hukum atau orang perorangan yang melakukan pengambil alihan.
- 3.3. Laporan tahunan terutama perhitungan tahunan buku terakhir dari perseroan dan badan hukum lain yang melakukan pengambil alihan.
- 3.4. Tata Cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang melakukan pengambil alihan dilakukan dengan saham.
- 3.5. Rancangan perubahan Anggaran Dasar Perseroan hasil pengambil alihan.
- 3.6. Jumlah saham yang akan diambil alih
- 3.7. Kesiapan pendanaan
- 3.8. Neraca gabungan performa perseroan  
  
Setelah pengambil alihan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan perseroan tersebut berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen.
- 3.9. Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambil alihan perusahaan.
- 3.10. Cara penyelesaian status karyawan dari perseroan yang akan diambil alih.
- 3.11. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambil alihan

4. Direksi perseroan yang akan diambil alih dengan pihak yang akan mengambil alih menyusun rancangan pengambil alihan secara bersama-sama yang isinya sekurang-kurangnya sebagaimana angka 3 diatas.
5. Direksi wajib mengumumkan ringkasan rancangan pengambil alihan dalam 2 surat kabar harian serta diberitahukan secara tertulis pada karyawan perseroan yang melakukan pengambil alihan paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perseroan.
6. Rancangan pengambil alihan yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perseroan yang akan diambil alih dan yang akan mengambil alih dituangkan dalam akta pengambil alihan dan dibuat oleh dan dihadapan Notaris dalam Bahasa Indonesia.

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum maupun dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.017/1993 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi bank bahwa merger dan konsolidasi perbankan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Merger dan konsolidasi antar bank hanya dapat dilakukan dengan ijin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia ( Pasal 15 PP Nomor 70 Tahun 1992 jo Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.107/1993 tahun 1993 ).
- b. Merger dan konsolidasi antar bank umum dengan Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan semata-mata untuk menyelesaikan masalah kesehatan Bank Perkreditan Rakyat yang bersangkutan ( Pasal 16 PP Nomor 70 Tahun



1992 jo Pasal 4 Butir a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222 / KMK.017/1993 Tahun 1993 )

- c. Salah satu bank umum harus memenuhi persyaratan membuka kantor cabang ( Pasal 17 butir a PP Nomor 70 Tahun 1992 jo Pasal 4 butir b Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.017/1993 Tahun 1993 )
- d. Telah mendapat persetujuan RUPS bagi bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau rapat anggota bagi bank yang berbentuk hukum koperasi ( Pasal 17 butir b PP Nomor 70 Tahun 1992 )
- e. Tingkat kesehatan bank hasil merger atau konsolidasi sekurang-kurangnya cukup sehat ( Pasal 17 Butir c PP Nomor 70 Tahun 1992 )
- f. Segala hak dan kewajiban bank yang melakukan merger atau konsolidasi beralih dan menjadi tanggung jawab bank hasil merger atau konsolidasi ( Pasal 17 butir d PP Nomor 10 Tahun 1992 )
- g. Pada saat terjadinya merger atau konsolidasi jumlah aktiva bank hasil merger tersebut tidak melebihi 20% dari jumlah aktiva ( asset ) seluruh bank umum di Indonesia.

#### Tata cara Perijinan

##### Untuk merger

- a. Pemberian ijin dilakukan dalam 2 tahap :
  - a.1. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan yang diberikan untuk melakukan persiapan merger.
  - a.2. Ijin merger, yaitu ijin penggabungan usaha dari dua atau lebih bank kedalam satu bank serta pencabutan ijin usaha bank yang dilikuidasi.

- b. Permohonan untuk butir a tersebut diajukan oleh direksi bank yang melakukan merger kepada Menteri Keuangan dengan tembusan ke Bank Indonesia.
- c. Permohonan untuk mendapatkan izin prinsip harus dilampiri dengan :
  - c.1. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham
  - c.2. Rancangan akta jual beli saham yang akan melakukan merger dan rancangan akta perjanjian merger.
  - c.3. Rancangan perubahan anggaran dasar dari bank hasil merger.
  - c.4. Proyeksi neraca dan perhitungan laba / rugi gabungan bank hasil merger.
- d. Permohonan untuk mendapatkan izin merger harus dilampiri dengan :
  - d.1. Perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang.
  - d.2. Akta jual beli saham bank yang melakukan merger dan akta perjanjian merger.
  - d.3. Neraca dan perhitungan laba /rugi dari bank hasil merger.

#### Untuk Konsolidasi

- a. Pemberian izin dilakukan dalam 2 tahap :
  - a.1. Persetujuan prinsip yaitu persetujuan yang diberikan untuk melakukan persiapan konsolidasi.
  - a.2. Izin konsolidasi dan izin usaha bagi bank hasil konsolidasi serta pencabutan izin usaha bank yang dikonsolidasikan.

- b. Permohonan untuk butir a tersebut diajukan oleh direksi bank-bank tersebut yang akan melakukan konsolidasi kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia.
- c. Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip harus dilampiri dengan:
  - c.1. notulen Rapat Umum Pemegang Saham.
  - c.2. Konsep surat perjanjian konsolidasi.
  - c.3. Rancangan anggaran dasar dari bank hasil konsolidasi.
  - c.4. Proyeksi neraca dan perhitungan laba / rugi gabungan bank hasil konsolidasi.
- d. Permohonan untuk mendapatkan ijin konsolidasi harus dilampiri dengan :
  - d.1. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
  - d.2. Surat perjanjian konsolidasi.
  - d.3. Neraca dan perhitungan laba /rugi dari bank hasil konsolidasi

Sedangkan prasyarat dan tata cara akuisisi bank berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222 / KMK.017/1993 Tahun 1993 sebagai berikut :

Persyaratan akuisisi :

- a. Harus ada ijin dari Menetri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Bank Indonesia ( Pasal 19 PP Nomor 70 Tahun 1992 jo Pasal 17 Ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.017/1993 Tahun 1993 )
- b. Akuisisi bank yang wajib mendapat ijin dari Menteri Keuangan apabila :

- b.1. Akuisisi bank umum yang berakibat penguasaan kepemilikan saham bank umum lebih dari 50% dari seluruh saham bank umum yang diambilalih.
- b.2. Akusisi Bank Perkreditan Rakyat yang melebihi 50% dari seluruh saham Bank Perkreditan Rakyat yang diambilalih ( Pasal 19 PP Nomor 70 Tahun 1992 jo Pasal 17 ayat 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.017/1993 Tahun 1993 )
- c.1. Badan Hukum atau perorangan yang melakukan akuisisi bank harus memenuhi tentang prasyarat kepemilikan bank, yaitu :
  - c.1. Badan Hukum dapat memiliki saham bank umum sebanyak-banyaknya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan.
  - c.2. Bagi warga negara asing dan atau badan hukum asing dapat membeli saham bank umum yang dijual melalui bursa efek di Indonesia sebanyak-banyaknya 49% dari saham yang dicatat pada bursa efek di Indonesia ( Pasal 13 dan 14 )

Tata cara akuisisi :

- a. Harus ada uji dari Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia.
- b. Permohonan ijin akuisisi diajukan oleh Pihak yang mengakuisisi dan oleh Direksi Bank terakuisisi kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia dengan dilampiri :

- b.1. Identitas pihak yang akan mengakuisisi yang sekurang-kurangnya berupa kartu tanda penduduk atau paspor untuk perorangan atau anggaran dasar dan neraca terakhir untuk badan hukum.
- b.2. Rancangan akta jual beli dalam rangka akuisisi.
- b.3. Komposisi pemegang saham bank setelah akuisisi
- b.4. Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP )

Sejalan dengan perkembangan dalam dunia perbankan yang semakin pesat dan mengingat bahwa bank adalah badan usaha yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat maka ketentuan merger, konsolidasi dan akuisisi bank perlu diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah untuk lebih memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi bank yang akan melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi

Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tanggal 7 Mei 1999 dan tanggal 14 Mei 1999 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger , Konsolidasi dan Akuisisi dan surat keputusan Bank Indonesia Nomor 32/51/Kep/Dir tentang persyaratan dan tata cara merger, konsolidasi dan akuisisi Bank Umum.

Berdasarkan kedua peraturan tersebut bahwa untuk pelaksanaan merger, konsolidasi dan akuisisi perbankan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dilakukan atas :

- 1.1. Inisiatif Bank yang bersangkutan atau
- 1.2. Permintaan Bank Indonesia atau

- 1.3. Inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.
2. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi sebagaimana angka 1.1.1. dan 1.1.3 harus memperoleh persetujuan dari Pimpinan Bank Indonesia terlebih dahulu.
3. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dilakukan dengan memperhatikan:
  - 3.1. Kepentingan Bank, kreditur, pemegang saham minoritas dan karyawan Bank
  - 3.2. Kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha Bank.
4. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.
5. Pemegang saham minoritas hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimiliki dibeli oleh Bank dengan harga yang wajar sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas.
6. Merger, konsolidasi dan akuisisi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham bagi Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas atau rapat sejenis bagi Bank yang berbentuk hukum lainnya.
7. Dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir.
8. Guna memperoleh izin merger atau konsolidasi, harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

- 8.1. Telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham bagi Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas atau rapat sejenis bagi Bank yang berbentuk hukum lainnya.
  - 8.2. Pada saat terjadinya Merger atau Konsolidasi jumlah aktiva Bank hasil merger atau konsolidasi tidak melebihi 20% dari jumlah aktiva seluruh Bank Indonesia
  - 8.3. Permodalan Bank hasil Merger atau Konsolidasi harus memenuhi ketentuan ratio kecukupan modal yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
  - 8.4. Calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditunjuk tidak tercantum dalam daftar orang-orang yang melakukan perbuatan tercela dibidang perbankan.
9. Guna memperoleh ijin Akuisisi wajib dipenuhi syarat sebagai berikut:
- 9.1. Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dari Bank yang akan diakuisisi atau Rapat sejenis dari Bank yang berbadan hukum bukan Perseroan Terbatas.
  - 9.2. Pihak yang melakukan akuisisi tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela dibidang perbankan.
  - 9.3. Dalam hal akuisisi dilakukan oleh Bank maka Bank wajib memenuhi ketentuan tentang penyertaan modal oleh Bank yang diatur oleh Bank Indonesia.

### **C. PROSES BERDIRINYA PT. BANK MANDIRI ( PERSERO )**

Bank BUMN apabila dilihat dari kepemilikan modalnya merupakan Badan Hukum Persero. Persero adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan

Terbatas yang seluruh modalnya dimiliki negara.

Sebelum berlakunya UUPT maka sebagai Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan tunduk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 jo KUHD dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum dan Persero.

Dengan berlakunya UUPT maka perseroan terbatas tunduk pada UUPT dan UUPT ini telah mencabut berlakunya Pasal 36 sampai dengan Pasal 58 KUHD yang mengatur tentang perseroan terbatas. Dengan demikian maka setiap perusahaan perseroan harus tunduk pada UUPT dan peraturan pelaksanaannya, sejak pendirian, beroperasinya hingga berakhirnya perseroan ataupun bubarnya serta ketentuan-ketentuan lain termasuk merger, konsolidasi dan akuisisi perseroan di bidang perbankan.

Didalam Pasal 1 angka 1 UUPT dinyatakan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

UUPT memberikan satu pengecualian atas kewajiban mendirikan perseroan terbatas oleh dua orang atau lebih bagi perusahaan perseroan, dengan demikian kewajiban mendirikan perseroan oleh dua orang atau lebih menjadi tidak berlaku bagi BUMN. BUMN dapat didirikan oleh satu pemegang saham yaitu negara dan diwakili oleh pemerintah.



Sejak tanggal 17 Januari 1998 Pemerintah telah menetapkan peraturan bagi Perusahaan Perseroan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang perusahaan perseroan yang mencabut berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan dan ketentuan perusahaan perseroan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983, sehingga untuk itu terhadap Perusahaan Perseroan berlaku ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 yang memiliki aturan yang berbeda dengan Peraturan Perusahaan Perseroan sebelumnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, namun Peraturan Pemerintah tersebut memberi pengaturan yang khusus berkaitan dengan karakter perusahaan perseroan sebagai perseroan terbatas yang sebagian sahamnya atau seluruhnya dimiliki negara.

Dengan adanya UUPT maka mekanisme kerja perusahaan perseroan di bidang perbankan selain tunduk pada Undang-Undang perbankan termasuk pembinaannya juga didasarkan pada ketentuan UUPT.

Di dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 mengatakan bahwa perusahaan perseroan adalah BUMN yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 yang berbentuk Perseroan Terbatas yang seluruh atau sedikitnya 51% saham yang dikeluarkannya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung. Dengan demikian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 perusahaan perseroan pada dasarnya adalah Perseroan Terbatas yang tunduk pada UUPT.

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah ini disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi perseroan terbatas yang termaktub didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Peraturan Pemerintah ini memberikan pengaturan khusus yang berkaitan dengan karakter perusahaan perseroan yang sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki negara.

Didalam Pasal 7 ayat 5 UUPT dinyatakan bahwa setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman maka berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 22 UUPT Direksi wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan dan wajib mengumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman ini bertujuan agar perseroan yang telah disahkan Menteri Kehakiman dapat berperan sebagai badan hukum tanpa membebani Direksi dengan tanggung jawab renteng apabila mereka melakukan tindakan hukum untuk kepentingan perseroan.

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal negara ke dalam perseroan terbatas dan setiap perubahannya harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya ditentukan pula pelaksanaan penyertaan dan perubahan itu dilakukan menurut ketentuan yang diatur dalam UUPT.

Berdasarkan Pasal 7 ayat 6 UUPT bahwa proses pendirian perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman, setelah itu menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perbankan dinyatakan bahwa untuk mengajukan ijin usaha kepada pimpinan Bank Indonesia harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya tentang :

- a. Susunan organisasi dan kepengurusan.
- b. Permodalan.
- c. Kepemilikan.
- d. Keahlian di bidang perbankan.
- e. Kelayakan rencana kerja.

Selain yang ditentukan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum Pasal 6 menyebutkan bahwa untuk mendapatkan ijin usaha sebagaimana tersebut diatas juga harus dilampiri :

- a. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang.
- b. Daftar pemegang saham, susunan direksi dan dewan komisaris.
- c. Susunan organisasi , sistem dan prosedur kerja.
- d. Bukti pelunasan seluruh modal disetor.

Menurut ketentuan Pasal 25 UUPT bahwa modal perseroan paling sedikit Rp. 20 juta, sedangkan di bidang usaha tertentu seperti halnya perbankan modal perseroan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 modal dasar perbankan di tetapkan minimal Rp. 50 milyar. Namun dengan keluarnya Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 32/33/Kep/Dir tentang bank Umum tanggal 12 Mei 1999 modal disetor untuk pendirian bank ditetapkan sekurang-kurangnya Rp. 3 Triliun.

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah mendirikan PT. Bank Mandiri ( Persero ) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Persero di Bidang Perbankan merupakan kebijakan awal dari penyatuan ke empat Bank BUMN dan sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut penyatuan tersebut akan diikuti proses lebih lanjut sehingga terwujud suatu bank milik negara yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi.

Pada umumnya penetapan Peraturan Pemerintah dalam rangka sebuah perusahaan perseroan merupakan hasil akhir dari suatu pengkajian dan pembahasan terhadap pemilihan bentuk pernyataan ke dalam bentuk merger, konsolidasi atau akuisisi.

Didalam merger ada unsur penyerapan yang salah satu perseroan dipertahankan dan lainnya menjadi bubar. Pada konsolidasi masing – masing perseroan melebur kedalam perseroan baru sebagai hasil konsolidasi dan masing – masing perseroan yang melebur menjadi bubar sehingga tidak ada perseroan yang dipertahankan. Pada akuisisi justru perseroan yang mengakuisisi dan yang diakuisisi masing – masing beroperasi secara sendiri tetapi perseroan yang diakuisisi dibawah kendali perusahaan yang mengakuisisi.

Pada kasus penyatuan keempat bank BUMN kedalam PT. Bank Mandiri (Persero), pilihan bentuk penyatuan dalam bentuk merger, konsolidasi atau akuisisi sebagaimana diatur dalam UU PT dan ketentuan lainnya tidak diikuti sepenuhnya. Pendirian PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 2 Oktober 1998 berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 75 tahun 1998 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 448/KMK.01/1998 serta Akta Pendirian nomor 10 tanggal 2 Oktober 1998 dibuat dihadapan Sutjipto, SH notaris di Jakarta dan disetujui oleh

Menteri Kehakiman dengan SK nomor C2 – 16561 HT 01.01.TH 98 tertanggal 2 Oktober 1998 serta dirumuskan dalam Berita Negera Republik Indonesia nomor 97 tanggal 4 Desember 1998 Tambahan nomor 6859/1998.

Pendirian PT. Bank Mandiri (Persero) dilakukan dengan penyertaan seluruh saham – saham pemerintah ( kecuali satu saham ) dalam masing-masing ke empat Bank BUMN serta penyetoran sejumlah uang tunai sebagai pembayaran atas modal pendirian PT. Bank Mandiri.

Untuk merealisasikan hal tersebut diatas maka sebelumnya ke empat Bank BUMN mulai dari BEII, BDN, BBD dan BAPINDO menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana tertuang dalam akta nomor 1, 2, 3 dan 4 masing-masing tertanggal 1 Oktober 1998 di hadapan Sutjipto, SH. Notaris di Jakarta.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB ) tersebut dilakukan secara terpisah dan bergantian serta mengambil tempat di ruang rapat kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Gedung Sapta Pesona lantai II yang dihadiri oleh Direksi dan Komisaris masing-masing ke empat bank BUMN dan pejabat kantor Menteri Pendayagunaan BUMN dan pejabat dari Departemen Keuangan.

Isi dari RUPSLB dari masing-masing ke empat bank BUMN tersebut memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memasukkan saham ( penyertaan ) atas sejumlah 999.999 lembar saham perseroan ( BEII, BDN, BBD, BAPINDO ) yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia dengan nilai Rp.599.999.000.000,- ke dalam suatu perseroan terbatas yang akan didirikan Pemegang Saham Perseroan dengan nama PT. Bank Mandiri ( Persero )

- b. Berdasarkan penyertaan saham tersebut PT. Bank Mandiri ( Persero ) akan memiliki sejumlah 999.999 lembar saham dan negara akan memiliki 1 ( satu ) saham dari saham-saham yang telah ditempatkan Perseroan.
- c. Setelah PT. Bank Mandiri ( Persero ) didirikan dan setelah mendapat pengesahan sebagai badan hukum kemudian memberitahukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan, maka Direksi Perseroan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Direksi PT. Bank Mandiri ( Persero ) sebelum melakukan tindakan-tindakan tersebut dibawah ini :
  - c.1. Melakukan perubahan struktur organisasi.
  - c.2. Membuat produk baru
  - c.3. Mengangkat pejabat baru atau melakukan promosi atau demosi jabatan.
  - c.4. Melakukan mutasi kepegawaian.
  - c.5. Mengubah sistim penggajian, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada menaikkan atau menurunkan gaji.
  - c.6. Mengubah pendanaan dan manfaat dari dana pensiun.
  - c.7. Melakukan penjelasan untuk investasi atau kapital expenditure lebih dari jumlah yang ditetapkan oleh Direksi PT. Bank Mandiri ( Persero ).
  - c.8. Mengeluarkan uang dalam jumlah tertentu sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi PT. Bank Mandiri ( Persero ).
  - c.9. Memberikan pinjaman baru dan atau menarik pinjaman baru, kecuali pinjaman money market, produk - produk pendanaan bank yang lain dalam transaksi-transaksi perbankan.
  - c.10. Melakukan hal-hal lainnya yang akan ditentukan oleh Direksi PT. Bank

Mandiri ( Persero ) setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan Gubernur Bank Indonesia.

- d. Direksi PT. Bank Mandiri ( Persero ) dalam memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam butir c diatas wajib berkonsultasi dengan Komisaris PT. Bank Mandiri ( Persero ).
- e. Rapat membebaskan Direksi dari segala tuntutan pihak ketiga akibat tidak diberitahukannya kepada pihak ketiga sebelum dilakukannya pengalihan / pemasukan ( inbreng ) saham milik negara Republik Indonesia yang ada di perseroan ke dalam PT. Bank Mandiri ( Persero ).
- f. Rapat memberikan kuasa kepada Markus Permadi, Asisten Menteri Negara / Deputi Usaha Pelayanan Masyarakat dan Pengembangan Sumber daya Badan dan Pengelola BUMN, khususnya untuk menandatangani akta perjanjian pemasukan ( inbreng ) dalam rangka pendirian perusahaan perseroan PT. Bank Mandiri ( Perseo ).

Setelah diselenggarakan RUPSLB ke empat bank BUMN pada tanggal 1-10-1998 maka pada tanggal 2-10-1998 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998 dan pada tanggal yang sama pula disusunlah anggaran dasarnya yang dibuat dihadapan sutjipto, SH. Notaris di Jakarta dengan akta Nomor 10 tanggal 2-10-1998 dan mendapat pengesahan sebagai badan hukum oleh Menteri Kehakiman dengan Nomor c2-16561 HT.01.01 TH.98 tertanggal 2-10-1998 dan diumumkan dalam Berita Negara Nomor 97 tanggal 4 Desember 1998 Tambahan Nomor 6859 / 1998.

Di dalam KUHD tidak diatur tentang perbuatan hukum seperti merger,

konsolidasi dan akuisisi, sedangkan Undang-Undang Perseroan terbatas ( UU Nomor 1 Tahun 1995 ) mengatur tentang tata cara merger, konsolidasi dan akuisisi dalam Bab XII Pasal 107 sampai dengan Pasal 109 dengan sub judul penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Adanya pengaturan yang sama tersebut karena antara merger, konsolidasi dan akuisisi ada 2 atau lebih perseroan dan perbedaannya hanya pada akibat hukumnya.

Batasan pengertian dinyatakan oleh Pasal 102 ayat 1 UUPT yaitu satu perseroan atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan perseroan yang telah ada atau meleburkan diri dengan perseroan lain dan membentuk perseroan baru.

Sedangkan Pasal 103 ayat 1 UUPT mengatakan bahwa pengambilalihan perusahaan dapat dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan. Dari ketentuan tersebut diatas tampak adanya kesamaan unsur yaitu adanya penyatuan dua atau lebih perseroan yang semula masing-masing berdiri sendiri kemudian menjadi satu kesatuan.

Dengan demikian maka pada hakekatnya merger mengandung unsur penyerapan satu atau lebih perseroan kedalam perseroan lain, salah satu perseroan tetap berdiri dengan mendapat aktiva serta pasiva dari perseroan yang bergabung. Pada konsolidasi pada hakekatnya merupakan penggabungan dua atau lebih perseroan yang kemudian membentuk satu perseroan baru. Pada akuisisi pada hakekatnya adalah penggabungan dua atau lebih perseroan yang mengakibatkan beralihnya kepemilikan sebagian besar atau seluruh saham suatu perseroan oleh perseroan lain yang mengambilalih yang pada akhirnya beralihnya kontrol atas perseroan yang diambil alih.



Pada merger tetap berdiri salah satu dari perseroan yang bergabung sehingga hanya mengubah anggaran dasar, sedangkan konsolidasi mengakibatkan perseroan yang bergabung menjadi lebur dan bubar sehingga berdiri perseoran baru dengan anggaran dasar baru.

Di dalam Pasal 102 ayat 2 UUPT dinyatakan bahwa rencana penggabungan atau peleburan di tuangkan ke dalam rancangan penggabungan atau peleburan yang memuat sekurang-kurangnya :

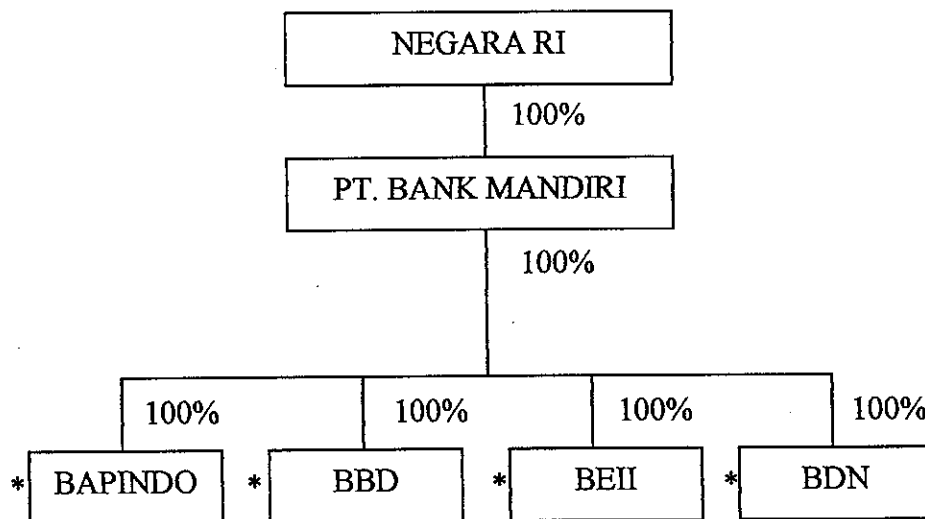
- a. Nama perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan.
- b. Alasan serta penjelasan masing-masing direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan.
- c. Tata cara konvensi saham dari masing-masing perseroan.
- d. Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan.
- e. Atau rancangan akta pendirian perseroan baru hasil konsolidasi.
- f. Neraca perhitungan laba rugi tiga tahun terakhir dair masing-masing perseroan.
- g. Hal-hal lain yang perlu diketahui oleh pemegang saham.

Sejak tanggal 24 Pebruari 1998 Pemerintah telah mengeluarkan peraturan pelaksanaan ketentuan UUPT yang mengatur tentang merger, konsolidasi dan akuisisi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Dalam peraturan pemerintah tersebut diatur tentang syarat-syarat dan tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.

Pada prinsipnya syarat-syarat dan tata cara tersebut sama dengan hal-hal yang diatur dalam UUPT, hanya dalam peraturan pemerintah tersebut telah diberikan penjelasan dan uraian secara jelas dan hal-hal yang kurang jelas atau belum diatur dalam UUPT antara lain tentang definisi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dan saat kapan akibat hukum dari ketiga perbuatan tersebut berlaku.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas setelah pemerintah mendirikan PT. Bank Mandiri ( Persero ) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998 dimana pendirian tersebut dilakukan dengan penyertaan atas seluruh saham pemerintah Republik Indonesia dalam masing-masing bank BUMN serta penyeteran sejumlah uang tunai sebagai pembayaran atas modal pendirian PT. Bank Mandiri ( Persero ) sehingga pada saat itu terdapat 5 ( lima ) bank BUMN yakni BEII, BDN, BBD, BAPINDO, dan PT. Bank Mandiri meskipun pada saat itu PT. Bank Mandiri ( Persero ) belum beroperasi namun untuk pengendalian management terhadap ke empat Bank BUMN ( BEII, BDN, BBD dan BAPINDO ) dipusatkan dan dikendalikan PT. Bank Mandiri ( Persero ) meskipun ke empat bank BUMN tetap memiliki status sebagai subyek hukum yang terpisah. Struktur kepemilikan PT. Bank Mandiri ( Persero ) dan ke empat Bank BUMN setelah pendirian PT. Bank Mandiri ( Persero ) adalah :



\* Sejak dilakukannya penyertaan tersebut maka ke empat Bank BUMN tidak lagi memperoleh status sebagai “ PERSERO “, karena saham-sahamnya harus dimiliki oleh paling sedikit dua pemegang saham seperti halnya perusahaan bukan persero. Satu saham dari masing-masing ke empat Bank BUMN dimiliki oleh negara Republik Indonesia dan selebihnya dimiliki oleh PT. Bank Mandiri ( Persero ).

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998 dinyatakan bahwa ketentuan mengenai proses penyatuan Pt. Bank Mandiri ( Persero ) dan Bank ( BEII, BDN, BBd dan BAPINDO ) dalam rangka penyatuan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Dalam rangka pelaksanaan penyatuan ke empat bank BUMN ke dalam PT. Bank Mandiri ( Persero ) dan juga guna memenuhi ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 maka penyatuan ke empat Bank BUMN dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Penyusunan usulan rencana penggabungan dari ke empat bank BUMN dan PT. Bank Mandiri dilakukan pada tanggal 5 Mei 1999 dengan dua versi yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- b. Usulan Rencana merger tersebut diatas telah memperoleh persetujuan dari Komisaris masing-masing ke empat bank BUMN sebagaimana tertuang dalam keputusan Komisaris BBD, BDN, BEI dan BAPINDO masing-masing dengan Nomor DEKOM/BBD/06/1999 tanggal 28 Mei 1999, Nomor 40/5/DK-BON tanggal 12 Mei 1999, Nomor SK-04/DK/V/99 tanggal 25 Mei 1999, sedangkan untuk persetujuan dari Dewan Komisaris Bapindo dilakukan tanpa Nomor dan tanggal.

Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi ketentuan usulan rancangan penggabungan tersebut.

- c. Guna memenuhi azas keterbukaan maka adanya rencana penggabungan tersebut diberitahukan secara formal kepada kreditur didalam dan di luar negeri masing-masing melalui surat tanggal 23-6-1999, yang isinya bahwa apabila kreditur tidak ada yang mengajukan keberatan secara formal terhadap rencana penggabungan sampai dengan tanggal 16-7-1999. Berdasarkan hukum Indonesia dianggap telah menyetujui rencana penggabungan tersebut. Disamping itu rencana penggabungan juga diumumkan pada para karyawan ke empat bank BUMN pada tanggal 9-7-1999.
- d. Atas dasar usulan rencana penggabungan telah disusun rancangan penggabungan pada tanggal 23-6-1999 oleh para direksi ke empat Bank

BUMN.

Pada dasarnya materi rancangan penggabungan adalah sama dengan usulan rencana penggabungan hanya saja dalam rancangan penggabungan ditambah adanya penegasan dari PT. Bank Mandiri ( Persero ) selaku penerima penggabungan untuk menerima pengalihan segala hak dan kewajiban dari ke empat Bank BUMN.

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1999 Ringkasan Rancangan Penggabungan tersebut telah diumumkan dalam 2 surat kabar pada tanggal 24 Juni 1999 masing – masing dalam surat kabar Media Indonesia dan Bisnis Indonesia.

- e. Pada tahap berikutnya Rancangan Penggabungan berikut konsep Akte Merger disampaikan kepada RUPS masing – masing bank BUMN untuk memperoleh persetujuan, dan persetujuan tersebut tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BBD, BDN, BEII, Bapindo dan PT. Bank Mandiri ( Persero ) dengan Nomor 93, 94, 95, 96,97 masing – masing tertanggal 24 – 7 – 1999 dibuat oleh Sutjipto, SH notaris di Jakarta.

Adapun isi dari RUPSLB tersebut yakni :

- Menyetujui masing – masing keempat bank BUMN untuk merger kedalam PT. Bank Mandiri (Persero), dimana PT. Bank Mandiri (Persero) akan menjadi perusahaan hasil merger dan keempat Bank BUMN akan bubar demi hukum tanpa didahului likuidasi.
- Menyetujui Rancangan merger yang telah disepakati bersama – sama

oleh masing – masing keempat bank BUMN dan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero).

- Menyetujui konsep Akte Merger yang telah disepakati bersama oleh masing – masing Direksi keempat bank BUMN dan Direksi PT. Bank Mandiri.
- Memberikan kuasa kepada Direksi keempat bank BUMN dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan merger tersebut, termasuk tapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani akta merger, dokumen – dokumen dan/atas akta – akta dan/atau surat – surat lain serta memberi data, informasi maupun keterangan yang diperlukan.

Khusus untuk Akte Nomor 97 tanggal 24 – 7 – 1999 tentang Berita Acara RUPSLB PT. Bank Mandiri (Persero) selain memberikan persetujuan untuk merger, rancangan merger, konsep akta merger juga memberikan persetujuan untuk mengadakan perubahan Anggaran Dasar.

- f. Setelah dilakukan RUPSLB semua memberikan persetujuan sebagaimana butir tersebut diatas, maka pada tanggal yang sama juga yakni tanggal 24 – 7 – 1999 dihasil yang sama juga yakni tanggal 24 – 7 – 1999 dihadapan Sutjipto, SH notaris di Jakarta dibuat Akta Merger yang tertuang dalam Akta Nomor 100 tanggal 24 – 7 – 1999 tentang merger PT. Bank Mandiri (Persero) dengan PT. Bank Bumi Daya, PT. Bank Dagang Negara, PT. Bank Ekspor Impor Indonesia dan PT. Bank Pembangunan Indonesia yang dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- g. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun

1999 maka Direksi masing – masing keempat bank BUMN dan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) dengan suratnya Nomor 816/Dir/1999 tanggal 26 Juli 1999 mengajukan ijin merger kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman, sedangkan laporan perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Mandiri (Persero) sehubungan dengan telah dilakukannya merger telah disampaikan kepada Departemen Kehakiman pada tanggal 26 – 7 – 1999.

- h. Berkaitan dengan permohonan ijin dan laporan tersebut maka Bank Indonesia telah mengeluarkan pemberian ijin penggabungan usaha (merger) dengan surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/9/KEP.GBI/1999 tanggal 29 – 7 – 1999.

Disamping hal tersebut Departemen Kehakiman juga telah melakukan pencatatan perubahan Anggaran Dasar pada tanggal 29 – 7 – 1999 dengan Nomor CO-13.781.HT.01.04 TH 99.

- i. Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Mandiri (Persero) tersebut telah didaftarkan dalam Tanda Daftar Perusahaan di Departemen Perindustrian dan Perdagangan di bawah Nomor 0903089 tanggal 31 Juli 1999 dan kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat 1 UUPT jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 dilakukan pengumuman merger pada tanggal 30 Agustus 1999 di 3 (tiga) Surat Kabar yaitu Media Indonesia, Suara Karya dan The Indonesian Observer.

Dengan diumumkannya hasil merger tersebut, maka seluruh Rangkaian proses Merger sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11

sampai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tersebut telah dipenuhi dan oleh karenanya legal merger PT. Bank Mandiri (Persero) telah menjadi efektif merger tanggal 31 – 7 – 1999.

#### **D. AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas bahwa telah dijelaskan Rencana penyatuan keempat Bank kedalam PT. Bank Mandiri (Persero) masih harus dilakukan proses pengkajian dan pembahasan sebagaimana dinyatakan dalam konsiderasi Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998 bahwa pendirian perusahaan perseroan akan diikuti penyatuan perusahaan perseroan PT. BEII, PT. BDN, PT. BBD dan PT. BAPINDO. Pada konsideran ini jelas nampak bahwa proses penyatuan keempat Bank BUMN ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) masih merupakan proses yang memerlukan pembahasan dan pengkajian lebih lanjut.

Pada umumnya hasil akhir dari pengkajian dan perubahan yang mendalam dalam perencanaan merger, konsolidasi dan akuisisi ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah untuk memutuskan perseroan baru dengan modal berasal dari Negara Republik Indonesia pada perseroan yang meleburkan diri dengan nama baru.

Proses pendirian PT. Bank Mandiri (Persero) berasal dari penyertaan modal negara Republik Indonesia dari keempat Bank yang akan bergabung.

Didalam konsolidasi pada umumnya setelah PT. Perusahaan Perseroan baru terbentuk dan memperoleh badan hukum maka perseroan yang melakukan penyertaan modal melebur kedalam perusahaan perseroan yang baru



terbentuk/didirikan tersebut.

Pada PT. Bank Mandiri (Persero) setelah memperoleh legalitas badan hukum keempat BANK masih tetap beroperasi sebagaimana halnya bank – bank pada umumnya dan keempat BANK menjadi bagian unit PT. Bank Mandiri (Persero). Sebagaimana hasil keputusan RUPSLB keempat BANK pada tanggal 1 – 10 – 1998 yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH Notaris di Jakarta dinyatakan bahwa setelah didirikan PT. Bank Mandiri (Persero) dan telah sah sebagai badan hukum maka Direksi Perseroan keempat BANK harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Direksi PT. Bank Mandiri dalam melakukan beberapa tindakan. Hal ini menunjukkan bahwa keempat BANK masih dapat melakukan aktivitas sebagaimana layaknya suatu bank namun dengan dibawah kendali PT. Bank Mandiri (Persero).

Pada konsolidasi bahwa perseroan yang telah menggabungkan diri sejak berdirinya badan hukum perseroan badan hasil konsolidasi, telah melebur menjadi satu dan bubar. Sedangkan didalam Pasal 119 ayat 1 UUPT dinyatakan bahwa dalam hal perseroan bubar, maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likwidasi.

Dalam Pasal 119 ayat 2 dinyatakan bahwa tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yaitu :

- a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan.
- b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan.
- c. Pembayaran kreditur.

- d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham.
- e. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Pada akuisisi yang terjadi bahwa masing – masing perseroan yang diambil alih masih melakukan aktivitasnya secara sendiri – sendiri namun dengan pengendalian manajemen dari perusahaan pengakuisisi.

Dari segi hukum merger, konsolidasi dan akuisisi memberi akibat tertentu terhadap perseroan yang bergabung atau yang meleburkan diri pada merger perseroan yang digabungkan/menggabungkan menjadi bubar. Pada akuisisi perseroan yang ada masing – masing tetap berdiri. Pada konsolidasi perseroan yang meleburkan diri menjadi hilang status badan hukumnya dan menjadi bubar sehingga mengakibatkan beralihnya hak dan kewajiban perseroan yang meleburkan diri kepada perseroan baru.

Berdasarkan data – data yang diperoleh di lapangan akibat hukum yang terjadi pada proses penyatuan keempat BANK ini meliputi :

#### 1. Modal

Modal merupakan salah satu faktor yang penting dalam kegiatan operasional perbankan. Dengan adanya penyatuan diharapkan terjadinya peningkatan modal, tetapi tidak semua bank hasil merger, konsolidasi atau akuisisi akan mengalami sinergi peningkatan modal.

Didalam Pasal 4 Anggaran Dasar PT. Bank Mandiri (Persero) dinyatakan bahwa modal PT. Bank Mandiri sebanyak Rp 16 trilyun yang terbagi atas 16.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- persaham dan negara Republik Indonesia ambil bagian 4.000.000 saham atau nilai seluruhnya

Rp 4 milyar.

Pada Pasal 4 ayat 3 dinyatakan bahwa 100% dari nilai nominal setiap saham telah ditempatkan dengan cara :

- a. Penyetoran dengan yang tunai Rp 1.600.004.000.000,- (satu trilyun enam ratus milyar empat juta rupiah).
- b. Pemasukkan (inbreng) saham milik negara Republik Indonesia dalam perseroan sebagai berikut :
  - b.1. PT. BEII (Persero) sebanyak 999.999 lembar saham dengan nominal masing – masing saham Rp 1.000.000,- yang dinilai sebesar Rp 599.999.000.000,-.
  - b.2. PT. BDN (Persero) sebanyak 999.999 lembar saham dengan nilai nominal masing – masing saham sebesar Rp 1.000.000,- yang dinilai sebesar Rp 599.999.000.000,-
  - b.3. PT. BBD (Persero) sebanyak 999.999 lembar saham dengan nilai nominal masing – masing saham sebesar Rp 1.000.000,- yang dinilai sebesar Rp 599.999.000.000,-
  - b.4. PT. BAPINDO (Persero) sebanyak 999.999 lembar saham dengan nilai nominal masing – masing saham sebesar Rp 1.000.000,- yang dinilai sebesar Rp 599.999.000.000,-

Namun setelah ditanda tangannya Akta Merger pada tanggal 24 – 7 – 1999 yang isinya antara lain bahwa keempat bank BUMN sepakat bergabung kedalam PT. Bank Mandiri (Persero). Sehingga susunan permodalan dan pemegang saham PT. Bank Mandiri (Persero) menjadi sebagai berikut :

- Modal dasar Rp 16.000.000.000.000,- terbagi atas 16.000.000 saham, masing – masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000,-
- Modal ditempatkan Rp 4.251.000.000.000,- terbagi atas 4.251.000, - saham.
- Modal disetor Rp 4.251.000.000.000,- atau 100% dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam PT. Bank Mandiri (Persero).
- Pemegang saham Negara Republik Indonesia sebesar 100%.

Atas perubahan modal ditempatkan dan disetor PT. Bank Mandiri (Persero) setelah ditandatangani akta merger secara hukum diadakan perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Mandiri dan hal tersebut telah dilaksanakan dalam akta Pernyataan Perusahaan Perseroan PT. Bank Mandiri Nomor 98 tanggal 24 – 7 – 1999.

## 2. Kepengurusan

Salah satu akibat hukum yang timbul adalah sumber daya manusia dalam hal ini komposisi pengurus, yakni sebagai berikut :

- a. Komposisi pengurus keempat BANK sebelum berdirinya PT. Bank Mandiri (Persero).

### a.1. PT. BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA (PERSERO)

Komisaris Utama	: Mursabdo
Komisaris	: Suad Musuan
Direktur Utama	: Kodradi
Direktur	: MAC Ratulangi
	: Sutopo Djoko Tarbuko
	: Agus Harijanto Djoyo Martono

a.2. PT. BANK DAGANG NEGARA (PERSERO)

Komisaris Utama : JB Kristiadi  
 Direktur Utama : Salahuddin Nya'Koi  
 Direktur : Lukman Nul Hakim  
 : ECW Nellor  
 : Bambang Sabariman  
 : Bambang Hendrajatin

a.3. PT. BANK BUMI DAYA(PERSERO)

Komisaris Utama : Umar Mohammad Said  
 Komisaris : Abdul Hadi Suwiyarso  
 : Fuad Bawazir  
 Direktur Utama : Ahmad Marzuki  
 Direktur : Muhammad Safruddin  
 : Agus Heru Soetomo

b. Komposisi pengurus PT. Bank Mandiri (Persero)

Komisaris Utama : Marie Mohammad  
 Komisaris : Soedaryono  
 Direktur Utama : Robby Djohan  
 Direktur : I Wayan Pugeg

c. Komposisi pengurus empat BANK setelah berdirinya PT. Bank Mandiri

c.1. PT. BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA (PERSERO)

Komisaris Utama : Robby Djohan  
 Komisaris : Binhadi  
 Direktur Utama : Agus Martowardoyo

Direktur : Heru Ratna Azimada  
: J.B. Kendarto

c.2. PT. BANK DAGANG NEGARA (PERSERO)

Komisaris Utama : Robby Djohan  
Komisaris : TM Syakur Machmud  
Direktur Utama : Peter B. Stok  
Direktur : Bambang Hendrajatin  
: Bambang Sabariman  
: I Soepomo

c.3. PT. BANK BUMI DAYA (PERSERO)

Komisaris Utama : Robby Djohan  
Komisaris : Setyanto P. Santosa  
Direktur Utama : Kodrati  
Direktur : Agus Heru Sutanta  
: Ira Hendarman  
: Noor Ilham

c.4. PT. BANK PEMBANGUNAN INDONESIA (PERSERO)

Komisaris Utama : Djunaidi Hadi Sumarto  
Komisaris : I Wayan Puggeg  
Direktur Utama : Agam Napitupulu  
Direktur : I Wayan Agus Martayasa

d. Komposisi pengurus PT. Bank Mandiri (Persero) setelah ditandatangani

Akte Merger pada tanggal 24 – 7 – 1999.

Komisaris Utama : Binhadi

Komisaris : Soedarjono  
 Komisaris : Markus Permadi  
 Komisaris : Sabana Kartasasmita  
 Direktur Utama : Robby Djohan  
 Direktur : I Wayan Pugeg  
 Direktur : Agus Martowardjojo

Pengangkatan dan penetapan susunan dewan komisaris dan direksi empat BANK setelah berdirinya PT. Bank Mandiri (Persero) bahwa Robby Djohan dan I Wayan Pugeg bertindak atas nama Direktur Utama dan Direktur PT. Bank Mandiri (Persero) mengangkat dan memberhentikan masing – masing Direksi keempat BANK.

Apabila dilihat dari komposisi kepengurusan keempat BANK jelas terlihat bahwa posisi Komisaris Utama diduduki oleh Robby Djohan yang juga sebagai Direktur Utama pada PT. Bank Mandiri (Persero).

Dalam ketentuan UUPT Direksi terlibat langsung dalam rencana merger, konsolidasi dan akuisisi sejak awal pembuatan Rancangan hingga perseroan baru.

Pada pendirian PT. Bank Mandiri (Persero) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998 dijadikan dasar hukum persetujuan RUPS atas penyertaan modal negara Republik Indonesia yang pengelolaannya dilakukan oleh Menteri Negara Pendayagunaan BUMN.

Berdirinya PT. Bank Mandiri direksi masing – masing perseroan tidak terlibat secara langsung dalam rencana pendirian, karena setiap perubahan struktur dan

penatausahaan BUMN dilaksanakan oleh Menteri Negara Pendayagunaan BUMN.

Namun setelah berdirinya PT. Bank Mandiri (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998 dengan penyertaan modal negara berasal dari penyertaan saham milik negara pada keempat bank BUMN dan penyetoran tunai dari negara sebesar Rp 1.600.004.000.000, maka terdapat 5 bank BUMN yakni BBD, BDN, BEIL, BAPINDO dan PT. Bank Mandiri meskipun PT. Bank Mandiri belum beroperasi sebagai layaknya bank pada waktu itu.

Keempat bank BUMN pada waktu itu telah sepakat akan bergabung ke dalam PT. Bank Mandiri ( Persero ) sehingga guna memenuhi Pasal 11 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999, maka Direksi keempat Bank mulai terlibat langsung dalam pelaksanaan penggabungan kedalam PT. Bank Mandiri ( Persero ).

Mulai tanggal 17 Januari 1998 pemerintah mengeluarkan peraturan bagi perseroan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan dan mencabut berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 dan ketentuan – ketentuan Perusahaan Perseroan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 maka terhadap ketentuan – ketentuan yang mengatur organ perseroan yang terdiri dari RUPS, Komisaris dan Direksi berlaku sebagaimana diatur dalam UUPT, namun dalam hal modal seluruhnya dimiliki negara dan Menteri Keuangan berkedudukan sebagai RUPS yang



berwenang pula mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris.

Pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Dirjen BUMN secara perorangan atau badan hukum untuk mewakili kepentingannya dalam RUPS perusahaan perseroan. Hal lain yang menyangkut karakter perusahaan perseroan sebagai BUMN dalam Pasal 34 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 yaitu Menteri Keuangan menyelenggarakan penata usahaan setiap penyertaan modal negara berikut perubahannya kedalam saham Perseroan Terbatas dan penyertaan – penyertaan yang dilakukan oleh perusahaan perseroan. Selanjutnya ayat 2 menyatakan bahwa pelaksanaan sehari – hari sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan oleh Dirjen Pembinaan BUMN.

Sejak tanggal 13 April 1998 kedudukan Menteri keuangan selaku pemegang saham atau RUPS Perusahaan Perseroan dialihkan pada Menteri Negara Pendayagunaan BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1998 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan wewenang Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham atau RUPS pada Perusahaan Perseroan kepada Menteri Pendayagunaan BUMN.

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 dinyatakan bahwa kewenangan Menteri Keuangan selaku RUPS dialihkan kepada Menteri Pendayagunaan BUMN termasuk kewenangan lainnya dari pemegang saham sebagaimana diatur dalam UUPT.

Didalam Pasal 107 ayat 1 UUPT dinyatakan bahwa didalam hal terjadi

penggabungan atau peleburan mengakibatkan perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

Pembubaran sebagaimana dimaksud ayat 1 tersebut dilakukan dengan atau tanpa likuidasi, sedangkan Pasal 107 ayat 3 menyatakan dalam hal pembubaran tidak diikuti dengan likuidasi maka :

1. Aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan hasil penggabungan.
2. Pemegang saham dari perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri menjadi pemegang saham dari perseroan hasil penggabungan atau peleburan.

Disini hak dan kewajiban yang beralih meliputi seluruh aktiva dan pasiva maupun seluruh hak dan kewajiban ke empat bank kepada PT. Bank Mandiri ( Persero ). Pengalihan hak dan kewajiban ini dalam kenyataannya tidak serta merta menjadi tanggung jawab PT. Bank Mandiri ( Persero ) tetapi ada kemungkinan terjadi tindakan dilakukan secara terpisah-pisah.

Aktiva pinjaman atau fasilitas kredit yang telah disalurkan kepada debitur dilakukan pengklasifikasian antara lain :

- a. Kredit dengan kolektibilitas lancar yaitu suatu kredit yang memenuhi persyaratan.
  - a.1. Untuk kredit dengan angsuran bukan KPR, maka kredit tersebut :
    - tidak ada tunggakan angsuran pokok bunga atau cerukan karena penarikan.
    - terdapat tunggakan angsuran pokok belum melampaui 1 bulan ( bagi

kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan ), atau belum melampaui 3 bulan ( bagi kredit yang ditetapkan masa angsuran bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan ) atau belum melampaui 6 bulan bila angsurannya ditetapkan 4 bulan atau lebih.

- terdapat tunggakan bunga tapi belum melampaui 1 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan atau belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.
- terdapat cerukan tapi belum melampaui 15 hari kerja.

a.2. Kredit dengan angsuran untuk KPR :

- Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok.
- Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi tidak melampaui 6 bulan.

a.3. Kredit tanpa angsuran

- kredit belum jatuh tempo dan tidak ada tunggakan bunga.
- bila ada tunggakan bunga itu tidak lebih 3 bulan.
- kredit telah jatuh waktu dan telah dilakukan analisa untuk perpanjangan.
- terdapat cerukan karena penarikan tapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari.

b. Kredit dengan kolektibilitas kurang lancar yaitu kredit yang memenuhi kriteria :

b.1. Kredit diluar KPR harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- terdapat tunggakan pokok yang melampaui 1 bulan bagi kredit yang masa angsurannya 1 bulan, atau melampaui 3 bulan bagi kredit yang

masa angsurannya ditetapkan bulanan / 2 bulanan atau 3 bulanan atau melampaui 6 bulan dan belum melampaui 12 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau lebih .

- terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tapi belum melampaui 30 hari kerja.
- atau melampaui 3 bulan tapi belum melampaui 6 bulan bagi angsurannya yang melebihi 1 bulan.

b.2. Bagi kredit KPR terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 6 bulan tapi belum melampaui 9 bulan.

b.3. Kredit tanpa angsuran

- kredit belum jatuh tempo dan terdapat tunggakan bunga melampaui 6 bulan atau terdapat penambahan plafond atau kredit baru yang dimaksudkan untuk melunasi tunggakan bunga.
- kredit telah jatuh tempo dan belum dibayar tapi belum melampaui 3 bulan.
- terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tapi belum melampaui 30 hari kerja.

b.4. Kredit yang diselamatkan :

- kredit yang mempunyai cerukan karena penarikan tapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja dan belum melampaui 30 hari kerja.

c. Kredit dengan kolektibilitas diragukan, yaitu kredit yang tidak memenuhi

kriteria lancar atau kurang lancar, tetapi kredit tersebut akan dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari utang debitur atau kredit tidak dapat diselamatkan tapi agunannya masih bernilai 100% dari utang debitur.

d. Kredit dengan kolektibilitas macet yaitu :

- d.1. Kredit yang tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan.
- d.2. Memenuhi kriteria diragukan tapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau penyelamatan kredit.
- d.3. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.<sup>46</sup>

Pada Kasus penyatuan ke empat Bank ke dalam PT. Bank Mandiri terhadap kredit-kredit dengan kolektibilitas kurang lancar dan diragukan diupayakan untuk dilakukan restrukturisasi sedangkan kredit dengan kolektibilitas macet tidak bisa direstrukturisasi.

---

<sup>46</sup> Untung, Budi Kredit Perbankan di Indonesia, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2000, Hal. 127-129

## KOMPLIKASI NERACA KEUANGAN

## EMPAT BANK BUMN PER 31-12-1997

( dalam jutaan rupiah )

No.	NAMA BANK	TOTAL AKTIVA	EQUITY	DANA YANG DITERIMA	KREDIT YANG DIBERIKAN
1.	BDN	43.490.825	2.556.784	34.820.379	32.284.878
2.	BBD	34.049.276	2.561.843	29.038.880	26.358745
3.	BEII	25.762.224	1.886.969	21.046.163	15.227.769
4.	BAPINDO	16.751.880	2.746.829	11.664.691	15.657.787
Sumber : Berita Perbanas No. 56 edisi 1998					

Berdasarkan data tersebut diatas maka dari keseluruhan kredit yang telah diberikan kepada debitur oleh keempat bank tersebut sejumlah Rp. 89.529.179.000.000,- berdsarkan audit dari akuntan asing terhadap ke empat bank tersebut sebesar 92% merupakan kredit macet ( Harian Media Indonesia tanggal 18-12-1998 ).

Untuk mewujudkan bank hasil penyatuan ke empat bank ke dalam PT. Bank Mandiri ( Persero ) yang betul-betul sehat dan kuat maka beberapa kewajiban yang manyangkut kredit macet diupayakan tidak akan menjadi beban PT. Bank Mandiri. Untuk kredit yang masih dapat direstrukturisasi akan dikelola oleh PT. Bank Mandiri ( Persero ) sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan.

Kredit yang tidak dapat direstrukturisasi atau kredit macet maka Dewan Komisaris dan Direksi pada waktu itu membentuk sebuah lembaga khusus yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada direksi dengan tugas mengkaji dan mengevaluasi kredit macet, memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk memberikan keputusan.

Pada umumnya untuk Bank BUMN terdapat debitur dengan kolektibilitas macet yang tidak dapat direstrukturisasi maka fasilitas kreditnya dilimpahkan penanganannya kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara guna dilakukan lelang terbuka dan hasil lelang tersebut setelah dikurangi dengan biaya-biaya maka sisanya untuk melunasi pinjaman debitur yang macet sebesar pokok dan biayanya.

Didalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dinyatakan bahwa apabila menurut Bank Indonesia terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional atas permintaan Bank Indonesia pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR RI dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan. Badan khusus yang dimaksud bersifat sementara yang memiliki tugas antara lain :

- a. Penyehatan bank yang diserahkan oleh Bank Indonesia.
- b. Penyelesaian asset bank baik aset fisik maupun kewajiban debitur melalui unit pengelola asset.
- c. Pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka PT. Bank Mandiri ( Persero ) membentuk suatu unit yang dinamakan Unit Pengelola Asset yang merupakan bagian dari kebijakan restrukturisasi perbankan secara umum. Sebelum merger secara hukum

dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan restrukturisasi kredit yang diberikan ke empat Bank BUMN.

Restruktirisasi ini tercermin pada pengalihan kredit macet oleh Unit Pengelola Aset ke AMU ( Asset Management Unit ) dan kredit yang tidak tergolong macet ke PT. Bank Mandiri ( Persero ). Kredit yang diserahkan kepada AMU adalah kredit dengan kategori 5, sebelum kredit tersebut diserahkan, terlebih dahulu dibentuk PPAP ( Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif ) untuk kredit sebesar kredit tersebut untuk pada waktunya di perhitungkan sebagai bagian dari kapitalisasi PT. Bank Mandiri ( Persero ). Kredit yang dialihkan ke AMU adalah kredit berjumlah sama dengan atau lebih dari Rp. 5 milyar, sedangkan kredit yang tidak tergolong macet dialihkan kepada Pt. Bank Mandiri ( Persero ).

Untuk pengalihan atau pelepasan asset bukan kredit ( Non Loan Assets ) dilaihan ke PT. Bank Mandiri atau jika tidak diperlukan akan dijual kepada pihak ketiga dengan nilai pasar yang wajar. Untuk itu diperlukan penilaian secara mendalam atas asset tersebut dengan meminta bantuan pihak perusahaan jasa penilai.

Sedangkan untuk pasiva masing-masing ke empat bank BUMN kepada pihak manapun maka beralih demi hukum kepada PT. Bank Mandiri ( Persero ) termasuk kewajiban berupa deposito, giro dan tabungan serta kewajiban bukan deposito kewajiban kepada Pemerintah Republik Indonesia, baik pusat maupun daerah, kreditur atau lembaga pembiayaan lain, pemegang saham, karyawan, nasabah dan pihak lainnya.



## **E. PERLINDUNGAN PARA PIHAK YANG BERKEPENTINGAN**

### **1. Perlindungan hukum bagi karyawan**

Dalam proses penyatuan ke empat bank BUMN ke dalam PT. Bank Mandiri ( Persero ) adalah diumumkannya pelaksanaan program pensiun sukarela ( PPS ) oleh masing-masing ke empat Bank BUMN dan program seleksi oleh PT. Bank Mandiri ( Persero ) pada tanggal 27-2-1999. PPS sebelum merger secara hukum dilaksanakan oleh masing-masing ke empat Bank BUMN dengan ketentuan :

- a. bagi karyawan yang mengikuti PPS akan diputuskan apakah PPS-nya dapat dibayarkan atau ditunda tanggal efektifnya karena karyawan tersebut masih diperlukan oleh ke empat bank BUMN.
- b. Bagi karyawan yang mengikuti seleksi PT. Bank Mandiri ( Persero ) tetapi tidak terseleksi tetap diperkenankan mengikuti PPS dengan formula yang sama.
- c. Masing-masing ke empat Bank BUMN membayar paket PPS atas dasar formula yang ditetapkan dalam buku panduan PPS.

Proses seleksi oleh PT. Bank Mandiri dilakukan secara objektif dengan bantuan konsultan internasional dimana untuk setiap bidang dan tingkatan pekerjaan disusun panduan seleksi dan diumumkan kepada seluruh karyawan ke empat Bank BUMN. PPS dari ke empat bank BUMN akan tetap diteruskan dan diambilalih pelaksanaannya oleh PT. Bank Mandiri ( Persero ) dengan formula yang tetap sama dengan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing ke empat bank BUMN.

Sebagai akibat dari pelaksanaan dari PPS masing-masing ke empat bank BUMN serta Program Seleksi Karyawan PT. Bank Mandiri yang diumumkan kepada karyawan ke empat bank BUMN pada tanggal 27-2-1999, maka karyawan ke empat bank BUMN terbagi atas :

- a. karyawan ke empat bank BUMN yang telah terseleksi untuk menjadi karyawan PT. Bank Mandiri ( Persero ) yang pada tanggal efektif otomatis menjadi karyawan PT. Bank Mandiri ( Persero ).
- b. Karyawan ke empat bank BUMN yang masih mengikuti proses seleksi pada tanggal efektif menjadi karyawan PT. Bank Mandiri dengan ketentuan :
  - d.1. bagi yang pada waktunya terseleksi akan tetap menjadi karyawan PT. Bank Mandiri ( Persero )
  - d.2. bagi yang tidak terseleksi namun yang bersangkutan masih diperlukan oleh PT. Bank Mandiri ( Persero ) akan berstatus sebagai karyawan PT. Bank Mandiri ( Persero ) dengan PPS tertunda.
  - d.3. bagi yang tidak terseleksi serta tidak diperlukan oleh PT. Bank Mandiri ( Persero ) akan berstatus sebagai karyawan peserta PPS.
- c. karyawan ke empat bank BUMN yang telah mengajukan PPS dan pembayaran PPSnya ditunda, ditetapkan sebagai karyawan PT. Bank Mandiri ( Persero ) dengan PPS tertunda.
- d. Karyawan ke empat bank BUMN yang tidak mengikuti PPS dan atau proses seleksi dengan ketentuan bahwa :
  - d.1. bagi yang masih diperlukan oleh PT. Bank Mandiri ( Persero ) dengan

berstatus sebagai karyawan PT. Bank Mandiri ( Persero ) dengan PPS tertunda.

d.2. bagi yang tidak diperlukan oleh PT. Bank Mandiri ( Persero ) ditetapkan sebagai karyawan peserta PPS.

Pihak-pihak sebagaimana huruf b, huruf c dan d akan memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas sebesar 100% dari hak karyawan yang bersangkutan pada saat merger secara hukum. Disamping itu karyawan yang bersangkutan akan diberikan insentif sebesar 5% dari penghasilan tetap ( take home pay ) karyawan yang bersangkutan. Insentif ini tidak berlaku untuk perhitungan PPS karyawan yang bersangkutan.

Bagi karyawan ke empat bank BUMN yang menjadi karyawan PT. Bank Mandiri ( Persero ) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.1. berlaku ketentuan kepegawaian PT. Bank Mandiri ( Persero ) yang diatur tersendiri pada waktu itu. Sedangkan bagi karyawan ke empat bank BUMN dengan status kontrak namun masih diperlukan oleh PT. Bank Mandiri ( Persero ), status kontraknya tetap berlaku pada tanggal efektif.

## 2. Perlindungan hukum bagi nasabah

Dalam proses penyatuan ke empat bank ke dalam PT. Bank Mandiri ( Persero ), direksi PT. Bank Mandiri ( Persero ) dan ke empat bank melakukan berbagai upaya untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada para nasabah. Dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat khususnya para nasabah penyimpan dana, direksi berupaya memberikan perlindungan dan pelayanan yang baik.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998 bahwa pemerintah memberikan jaminan pemenuhan kewajiban pembayaran dari bank berdasarkan peraturan pemerintah ini sesuai dengan keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum.

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut maka kewajiban terhadap nasabah penyimpanan dana pada ke empat bank beralih menjadi tanggung jawab PT. Bank Mandiri ( Persero )

#### **F. PERAN BANK INDONESIA DALAM PROSES PENYATUAN KE EMPAT BANK KE DALAM PT. BANK MANDIRI ( PERSERO )**

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan bahwa salah satu tugas dari Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi bank.

Dalam hal keadaan suatu bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional maka sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Indonesia dapat melakukan tindakan antara lain agar bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain.

Pada kasus penyatuan ke empat bank ke dalam PT. Bank Mandiri ( Persero ) dasar hukum dalam proses penyatuan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik

Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan di bidang perbankan.

Dengan adanya peraturan pemerintah ini, maka Bank Indonesia selaku pemegang otoritas moneter dan pengawas perbankan dianggap telah menyetujui kebijakan pendirian PT. Bank Mandiri ( Persero ). Bank Indonesia hanya berperan memeberikan pertimbangan-pertimbangan dan mensuport data untuk membantu kelancaran proses penyatuan ke empat Bank BUMN antara lain memberikan suatu data keuangan, memeбрикаn ijin merger sebagaimana keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/9/Kep.GBI/1999 tanggal 29-7-1999, memberikan ijin untuk pembukaan atrau penutupan cabang PT. Bank Mandiri Persero sebagaimana halnya penutupan PT. Bank Mandiri ( Persero ) Cabang Semarang Kepodang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari data-data hasil penelitian lapangan yang kemudian dipadu dengan teori dalam literatur diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penyatuan PT. BDN, PT. BBD, PT. BEI dan PT. BAPINDO didahului dengan mendirikan PT. Bank Mandiri ( Persero ). Modal PT. Bank Mandiri ( Persero ) selain disetor oleh pemerintah Republik Indonesia juga berasal dari inbreng / pengambilalihan saham atas seluruh saham pemerintah Republik Indonesia ( kecuali satu saham ) dalam masing ke empat bank BUMN dengan demikian maka terdapat 5 bank BUMN yakni PT. BDN, PT. BBD, PT. BEI, PT. BAPINDO dan PT. Bank Mandiri ( Persero ) dan masing-masing bank tersebut beroperasi sebagai layaknya sebuah bank kecuali PT. Bank Mandiri ( Persero ) namun kendali management berada di bawah PT. Bank Mandiri ( Persero ).

Dari proses tersebut maka penyatuan ke empat Bank BUMN tersebut pada awalnya dilakukan terlebih dahulu dengan menempuh cara akuisisi meskipun pelaksanaan akuisisi tersebut tidak murni karena ketentuan dalam Pasal 11 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank tidak dilaksanakan.

Dengan adanya proses akuisisi tersebut diatas sebagaimana tertuang dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 1,2,3 dan 4 masing-

masing tertanggal 1 Oktober 1998 dihadapan Sutjipto SH., Notaris di Jakarta, maka PT. Bank Mandiri Persero merupakan perusahaan Holding Company terhadap ke empat Bank BUMN.

Setelah berdirinya PT. Bank Mandiri ( Persero ) dengan proses sebagaimana tersebut diatas maka ke empat bank BUMN bersepakat untuk menggabungkan diri ke dalam PT. Bank Mandiri ( Persero ) dan hal tersebut dilakukannya dengan ditandatanganinya Akta Merger Nomor 100 tanggal 24-7-1999 yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH. Notaris di Jakarta oleh PT. BDN, PT. BBD, PT. BEII, PT. BAPINDO dan PT. Bank Mandiri ( Persero ) sehingga proses selanjutnya penyatuan ke empat bank BUMN ke dalam PT. Bank Mandiri ( Persero ) menempuh cara merger.

2. Akibat hukum yang terjadi pada proses penyatuan PT. BDN, PT. BBD, PT. BEII dan PT. BAPINDO ke dalam PT. Bank Mandiri mengakibatkan perubahan yang meliputi perubahan modal, kepengurusan, pengalihan aktiva dan pasiva, perubahan kedudukan dan peran karyawan dan nasabah dari ke empat bank BUMN. Kepengurusan ( Komisaris dan Direksi ) dari ke empat BUMN mengalami perubahan, pada saat sebelum diakuisisi berdiri secara mandiri namun setelah diakuisisi oleh PT. Bank Mandiri ( Persero ) peran dari direksi dan komisaris ke empat bank BUMN sepenuhnya dikendalikan oleh PT. Bank Mandiri sehingga memposisikan PT. Bank Mandiri sebagai induk perusahaan dan ke empat bank BUMN sebagai anak perusahaan. Namun dengan Akta Merger Nomor 100 tanggal 24-7-1999 ke empat bank BUMN sebagai anak perusahaan telah sepakat akan menyatu atau bergabung

ke dalam PT. Bank Mandiri ( Persero ) sehingga mengakibatkan bubarnya ke empat bank BUMN tersebut termasuk Komisaris dan Direksi ke empat bank BUMN.

3. Sebelum proses penyatuan PT. BDN, PT. BBD, PT. BEI dan PT. BAPINDO ke dalam PT. Bank Mandiri ( Persero ) dengan cara merger terhadap karyawan tidak dilakukan dengan pemutusan hubungan kerja dengan ke empat bank BUMN tetapi Direksi PT. Bank Mandiri ( Persero ) menawarkan kepada karyawan masing-masing ke empat bank BUMN Program Pensiun Sukarela ( PPS ) dan Program Seleksi untuk menjadi karyawan PT. Bank Mandiri ( Persero ).

Bagi para karyawan yang memilih PPS selain diberikan pesangon dan karyawan yang berpotensi namun yang bersangkutan mengikuti PPS diberi kesempatan mengikuti pelatihan dan mengelola perusahaan milik debitur yang bermasalah.

Demikian juga perlindungan terhadap nasabah untuk dana masyarakat yang ada dalam ke empat bank BUMN serta kewajiban terhadap kreditur yang ada pada ke empat bank BUMN pada saat penyatuan ke empat bank BUMN ke dalam PT. Bank Mandiri ( Persero ) sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan program penjamin pemerintah atas kewajiban bank umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang jaminan terhadap pembayaran bank umum dan peraturan pemerintah Nomor 75 Tahun 1999 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan Persero di bidang perbankan.



Adapun upaya yang dilakukan oleh Direksi PT. Bank Mandiri ( Persero ) dengan melakukan penjelasan dan pelayanan informasi melalui media cerak tentang proses perkembangan penyatuan ke empat bank BUMN hingga berakhirnya prosespenyatuan.

4. Bank Indonesia selaku otoritas moneter dalam hal proses penyatuan ke empat bank BUMN ke dalam PT. Bank Mandiri ( Persero ) tidak berperan aktif dan ikut campur melainkan Bank Indonesia hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan maupun informasi-informasi tentang tehnis administratif yang ada hubungannya dengan tata cara merger, konsolidasi dan akuisisi serta memberikan ijin terhadap pembukaan atau penutupan terhadap kantor cabang ke empat bank BUMN yang diperlukan atau tidak diperlukan oleh PT. Bank Mandiri ( Persero )

## **B. SARAN**

1. Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan pada angka 1 diatas maka penulis memberikan saran bahwa agar nantinya pemerintah di dalam melaksanakan merger, konsolidasi atau akuisisi terhadap suatu badan usaha, baik yang berbentuk Perseroan Terbatas maupun BUMN hendaknya ketentuan-ketentuan yang berlaku dilaksanakan secara konsisten. Hal tersebut mengingat bahwa di dalam proses penyatuan ke empat bank BUMN ke dalam PT. Bank Mandiri ( Persero ) yang dilakukan melalui proses akuisisi terlebih dahulu baru kemudian dilaksanakan dengan melalui proses merger.

Namun demikian terhadap proses akuisisi yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri ( Persero ) terhadap ke empat bank BUMN ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 103 UUPT tidak dilaksanakan antara lain tentang dibuatnya rancangan pengambilalihan oleh direksi perseroan yang akan mengambilalih dan yang akan diambilalih.

2. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998 huruf b menimbang dikemukakan antara lain bahwa penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan di bidang perbankan ( dalam hal ini PT. Bank Mandiri ) akan diikuti dengan proses penyatuan ke empat bankBUMN dan menjadikan suatu bank milik negara yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas maka setelah bergabungnya ke empat bank BUMN ke dalam PT. Bank Mandiri ( Persero ) dan PT. Bank Mandiri ( Persero ) beroperasi penuh hendaknya pihak-pihak manajemen berusaha menjaga eksistensi terhadap beroperasinya PT. Bank Mandiri ( Persero ) agar supaya jangan sampai terpuruk sebagaimana ke empat bank BUMN pada masa lalu antara lain dengan tetap memenuhi CAR yang telah ditentukan oleh pemerintah, memperhatikan prinsip Prudent Banking misalnya dalam setiap proses pemberian kredit kepada calon nasabah prinsip 5 C harus benar-bener diterapkan.

## **RINGKASAN**

Merger, Konsolidasi dan Akuisisi selain diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perseroan Terbatas Pasal 102 sampai dengan Pasal 109 juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Sedangkan untuk Perbankan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

Pengertian Merger, Konsolidasi dan Akuisisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

- a. Merger adalah penggabungan dari 2 ( dua ) Bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu Bank dan membubarkan Bank-Bank lainnya tanpa likuidasi terlebih dahulu.
- b. Konsolidasi adalah penggabungan dari 2 ( dua ) Bank atau lebih dengan cara mendirikan Bank baru dan membubarkan Bank-Bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu.
- c. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Bank.

Sedangkan apabila ada beberapa Bank yang akan melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 dapat dilakukan atas :

- a. Inisiatif Bank yang bersangkutan atau
- b. Permintaan Bank Indonesia atau

- c. Inisiatif Badan Khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan

Latar belakang dilakukannya penyatuan ke 4 ( empat ) Bank BUMN ( BBD, BDN, BEI dan BAPINDO ) ke dalam PT. Bank Mandiri ( Persero ) disebabkan antara lain krisis ekonomi nasional yang melanda Indonesia sehingga menyebabkan perlunya pembenahan di sektor Perbankan di Indonesia. Untuk itu Pemerintah Republik Indonesia dengan bantuan Internasional Monetary Fund ( IMF ), Bank Dunia dan Asean Development Bank telah menetapkan kebijaksanaan dan Program Rekapitalisasi Bank Umum baik swasta maupun pemerintah.

Dalam hubungan ini maka pemerintah telah memutuskan untuk melakukan penggabungan ke 4 ( empat ) Bank BUMN tersebut ke dalam PT. Bank Mandiri ( Persero ), sehingga dengan dilakukannya penggabungan tersebut yang didahului restrukturisasi akan menjadikan PT. Bank Mandiri ( Persero ) sebagai bank yang kokoh dan berdaya saing tinggi.

Pendirian PT. Bank Mandiri ( Persero ) pada tanggal 2 Oktober 1998 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK01/1998 serta Akte Pendirian Nomor 10 tanggal 2 Oktober 1998 dibuat dihadapan Sucipto, SH. Notaris di Jakarta dan disetujui oleh Menteri Kehakiman berdasarkan SK. No. C2-16561.HT.0101.TH 98 tanggal 2 Oktober 1998 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 97 tanggal 4 Desember 1998 Tambahan No. 6859/1998.

Pendirian PT. Bank Mandiri ( Persero ) dilakukan dengan inbreng atas seluruh saham pemerintah ( kecuali satu saham ) dalam masing-masing ke 4 ( empat ) Bank BUMN serta penyetoran sejumlah uang tunai sebagai pembayaran atas modal pendirian PT. Bank Mandiri ( Persero ) dan hal tersebut tertuang dalam Akte Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ke 4 ( empat ) Bank BUMN yakni Akte Nomor 1, 2, 3, dan 4 masing-masing tertanggal 10 Oktober 1998 dihadapan Sutjito, SH. Notaris di Jakarta.

Dengan adanya inbreng tersebut diatas maka pengendalian operasi ke 4 ( empat ) Bank BUMN oleh PT. Bank Mandiri ( Persero ) sebagai perusahaan Holding Company dengan anak perusahaan ke 4 ( empat ) Bank BUMN tersebut sehingga pada waktu itu ada 5 ( lima ) Bank Pemerintah yakni BBD, BDN, BEIL, BAPINDO dan PT. Bank Mandiri ( Persero ).

Ke 4 ( empat ) Bank BUMN tersebut kemudian mengadakan kesepakatan untuk bergabung ke dalam PT. Bank Mandiri ( Persero ) dengan memilih proses merger sebagaimana tertuang dalam Akta Merger Nomor 100 tanggal 24 Juli 1999 yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH. Notaris di Jakarta.

Perbuatan hukum penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 antara lain tentang :

- a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawannya.
- b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

- c. Tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.

Dalam proses penyatuan ke 4 ( empat ) Bank BUMN ke dalam PT. Bank Mandiri ( Persero ) dan guna memenuhi Pasal 104 tersebut diatas maka pemerintah telah memberikan perlindungan hukum kepada :

- a. Karyawan

Ke 4 ( empat ) Bank BUMN telah mengumumkan Program Pensiun Sukarela ( PPS ) dan Program Seleksi oleh PT. Bank Mandiri ( Persero ) pada tanggal 27 Pebruari 1999.

- b. Nasabah

Perlindungan kepada nasabah yakni dengan memberikan perlindungan dan pelayanan yang baik kepada para nasabah dengan tujuan untuk memberikan rasa kepercayaan masyarakat kepada bank khususnya para penyimpan dana.

Disamping itu sesuai Pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998 bahwa pemerintah memberikan jaminan pemenuhan kewajiban pembayaran dari bank. Oleh karena itu maka kewajiban terhadap nasabah penyimpan dana pada ke 4 ( empat ) Bank BUMN beralih menjadi tanggung jawab PT. Bank Mandiri ( Persero ).

Adapun peran Bank Indonesia dalam proses penyatuan ke 4 ( empat ) Bank BUMN ke dalam PT. Bank Mandiri ( Persero ) hanya berperan memberikan pertimbangan-pertimbangan, mensupport data-data untuk membantu kelancaran proses penyatuan serta memberikan ijin merger.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Chidir, Badan Hukum, penerbit Alumni, Bandung, 1999.
- Amirizal, Hukum Bisnis Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia, penerbit Djambatan, Jakarta, 1996.
- Anisitus, Amanat, Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris, penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Ashshof, Burhan, Metode Penelitian Hukum, penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Badruzaman, Narian Darus, Aneka Hukum Bisnis, penerbit Alumni Bandung, 1994.
- Djumhana, Muhamad, Hukum Perbankan di Indonesia, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- -----, Rahasia Bank ( Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia ) penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Fuady, Meenir, Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- -----, Hukum Perbankan Modern, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- -----, Hukum tentang Merger, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- -----, Hukum tentang Akuisisi, Take Over dan LBO, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Go Marcel, Akuisisi Bisnis Analisis dan Pengelolaan, penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Gautama, Sudargo, Komentar Atas Undang-Undang Perseroan Terbatas ( baru ) Tahun 1995 Nomor 1 – Perbandingan Dengan Peraturan Lama, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

- Hartono, Sri Redjeki, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Joyosumarto, Subarjo, Upaya-upaya Bank Indonesia dan Perbankan Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah, Majalah Pengembangan Perbankan, Jakarta, Edisi Nomer 47 – Mei – Juni 1994 )
- Kancil C. S. T, Hukum Perusahaan Indonesia Bagian 2, penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perusahaan Indonesia, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Mordalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Nasution S, Metode Research, penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Prasetya, Rudhi, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996.
- Purwosutjipto, HMN, Pengertian Pokok Hukum Tentang Bentuk-Bentuk Perusahaan Jilid II, penerbit Djambatan, Jakarta, 1985.
- Rusli, Hardiyana, Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya, penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Rido, Ali, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf, penerbit Alumni, Bandung, 1986
- Sembiring, Sentosa, Hukum Perbankan, penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Supramono, Gatot, Hukum Perseroan Terbatas yang Baru, penerbit Djambatan, Jakarta, 1999.
- Suyatno, Thomas, Kelembagaan Perbankan, penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- Soekanto, Soerjono, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- -----, Pengantar Penelitian Hukum, penerbit Universitas Indonesia ( UI Press ), Jakarta, 1986.



- Soemitro, Ronny Hanitijo , Metodologi Penelitian Hukum, penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- -----, Metodologi Penelitian hukum dan Geometri, penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, Perusahaan Kelompok ( Group Company / Concern ), penerbit Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajahmada, Yogyakarta, 1994
- Suryabrata, Sumadi, Metode Penelitian, penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1988.
- Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Widjaja, Gunawan, Merger Dalam Perepdetif Monopoli, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Widjaja, I. G. Rai, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, penerbit Kesaint Blanc, Bekasi, 2000.
- Yani Ahmad, Perseroan Terbatas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Yara Madiyar, Merger ( Penggabungan Perusahaan ) penerbit PT. Nadilla Ceria Indonesia, Jakarta, 1995

#### **B. Undang – Undang / Peraturan Pemerintah**

- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk – bentuk Usaha Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Persero.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero).

- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuid dari Bank.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1996 tentang Perusahaan Persero.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambil alihan Perseroan Terbatas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan Tugas Dan Wewenang Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan kepada Menteri Pendayagunaan BUMN.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan di bidang Perbankan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum..
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK 017/1993 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/Dir tanggal 12 – 05 – 1999 tentang Bank Umum.
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 01 – PR 08. 01 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.